

**ANALISIS KEPENTINGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)
DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH MYANMAR
TERHADAP ROHINGYA PERIODE 2012-2017**

SKRIPSI



Oleh :

RANA SAUSAN

NIM. 14323015

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**ANALISIS KEPENTINGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)
DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH MYANMAR
TERHADAP ROHINGYA PERIODE 2012-2017**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh :

RANA SAUSAN

NIM. 14323015

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS KEPENTINGAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)
DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH MYANMAR
TERHADAP ROHINGYA PERIODE 2012-2017

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Dewan Penguji

1. Irawan Jati, S.IP., M.Hum., M.S.S
2. Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
3. Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A

Tanda Tangan

Two handwritten signatures in blue ink are shown below the 'Tanda Tangan' label. The first signature is in black ink and the second is in blue ink.

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rana Sausan
No. Mahasiswa : 14323015
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Analisis Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok (RRT)
Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar
Terhadap Rohingya Periode 2012-2017

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa :

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 09 Oktober 2018

Yang menyatakan



Rana Sausan

HALAMAN PERSEMBAHAN



Penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua tercinta yaitu Bapak **Suhanda** dan Ibu **Normauliati** yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya yang selalu mendoakan saya disetiap sujudnya, memberi nasehat, menguatkan, dan memberikan motivasi dengan sebesar-besarnya. Semoga kelak anakmu ini menjadi anak yang soleha, rajin, berilmu, dan bermanfaat bagi keluarga, bangsa, dan negara.

Tidak lupa penulis juga berterimakasih kepada kakakku **Norfia Handayani** dan abangku **Maulana Hidayat** yang sangat saya sayangi, terimakasih telah menjadi kakak dan abang yang baik, dapat memberikan contoh yang baik, selalu menyayangi, dan mendukung adiknya hingga menjadi seorang sarjana Hubungan Internasional. Semoga semua kebaikan kalian terbalaskan oleh ALLAH SWT.

Tidak lupa penulis mengucapkan syukur pada diriku sendiri yang telah berjuang dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini agar dapat membanggakan kedua orang tua, kakak, dan abangku tercinta walau harus merantau jauh ke kota Yogyakarta demi menuntut ilmu seluas-luasnya "Jangan hanya puas sampai disini ! Teruslah menuntut ilmu hingga ke negeri China demi menggapai cita-cita, jangan mudah menyerah, semangat!"

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٦٠﴾

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦١﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦٢﴾

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٦٣﴾

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Al-Insyirah, 6-8).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al-mujadilah, 11).

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya berupa keimanan, kesehatan, kekuatan, kelancaran serta keselamatan yang diberikan kepada penulis selama berjalannya proses penelitian. Sehingga peneliti mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya Periode 2012-2017”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi, penulis mendapatkan banyak dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Irawan Jati, S. IP., MH., MSS, sebagai Ketua Kaprodi Hubungan Internasional sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik saya. Saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas arahan bapak dalam membimbing saya sejak awal masuk perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menjadi anak didik bapak, saya melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati bapak

baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, rejeki yang lancar serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

3. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., selaku Dosen HI UII dan Dosen Penguji Seminar Proposal. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah memberikan ilmu dengan sangat ramah dan sabar serta terima kasih banyak atas bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan skripsi saya. Semoga Bapak selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
4. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku dosen HI UII dan Dosen Penguji Skripsi saya. Saya ucapkan terimakasih banyak atas kritik dan saran-sarannya terhadap penulisan skripsi saya. Semoga Bapak selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT.
5. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., Ibu Karina Utami Dewi S.IP.,M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A. Terima kasih atas ilmu yang diberikan dan mohon maaf apabila penulis melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja.
6. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah memberikan kemudahan dalam segala urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih sudah jadi teman jalan, teman nonton di bioskop, teman belanja *make-up*, dan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan informasi mengenai

jadwal perkuliahan maupun sebagai wadah penampungan pertanyaan mahasiswa dan mahasiswi HI UII.

7. Kedua orang tua tercinta yakni bapak Suhandi dan Ibu Normauliati yang tidak pernah henti dalam mendoakan penulis agar penulis selalu diberikan lindungan dan kelancaran dalam menempuh pendidikan.
8. Sahabat dan teman-teman persejuangan selama kuliah atas bantuan, doa, dan dukungannya terhadap penulis. Terimakasih kepada Rifda Rosina, Okta Maryana D, Muhammad Farhan A.F. Tidak lupa teman-teman satu DPS yang dari awal berjuang bersama menghadapi lika-liku penulisan skripsi terimakasih kepada Aufa, Elyana, Trivida, dan Devi yang telah memberikan masukan-masukan terhadap penulisan skripsi saya. Tidak lupa teman-teman satu DPA, teman-teman KKN, teman-teman KOMAHI UII periode 2015-2016, serta teman-teman dari Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya periode 2016-2017.
9. Teman-teman HI UII angkatan 2014, terimakasih telah berjuang bersama-sama selama masa kuliah dan terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis.
10. Terimakasih pada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis. Penulis berpesan agar kita semua terus maju, pantang menyerah, dan teruslah bersemangat dalam menempuh pendidikan demi kebaikan kita kelak.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis baik secara

langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi referensi pembaca yang mungkin sedang menyusun tugas akhir maupun untuk mencari informasi terkait pembahasan yang telah penulis teliti.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 09 Oktober 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR DIAGRAM	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Signifikansi.....	7
1.5 Cakupan Penelitian.....	8
1.6 Tinjauan Pustaka	9
1.7 Perspektif Teori/Konsep/Pendekatan	12
1.8 Metode Penelitian.....	17
1.8.1 Jenis Penelitian.....	17
1.8.2 Subjek Penelitian.....	18
1.8.3 Alat Pengumpul Data	19
1.8.4 Proses Penelitian	19
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP ROHINGYA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Kebijakan Penolakan Kewarganegaraan	20
2.2 Kebijakan Pembatasan Hak Sosial	23
2.2.1 Kebijakan pembatasan kebebasan untuk bepergian.....	23
2.2.2 Kebijakan pembatasan hak menikah dan berkeluarga	25
2.2.3 Kebijakan pembatasan hak untuk beribadah.....	27
2.3 Kebijakan Pembatasan Akses Pendidikan dan Kesehatan	29
2.4 Kebijakan Pengusiran.....	31

BAB III KEBIJAKAN LUAR NEGERI RRT TERHADAP MYANMAR.....Error!

Bookmark not defined.

3.1	Kebijakan Ekonomi.....	35
3.2	Kebijakan Politik.....	38

BAB IV ANALISIS KEPENTINGAN RRT DALAM MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP ROHINGYAError! Bookmark not defined.

4.1	Contoh Kerjasama RRT-Myanmar dalam Bidang Ekonomi.....	43
4.2	Contoh Kerjasama RRT-Myanmar dalam Bidang Politik.....	46
4.3	RRT Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya	48
4.4	Kepentingan Ekonomi RRT di Myanmar.....	50
4.4.1	Proyek Pipa Minyak dan Gas.....	51
4.5	Kepentingan Politik RRT di Myanmar	54
4.6	Analisis Pendekatan Rational Choice Theory (RCT).....	60
4.6.1	Cost	60
4.6.2	Benefit.....	63
4.6.3	Hambatan RRT Dalam Menjalankan Proyeknya di Myanmar	64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....69

DAFTAR PUSTAKA.....75

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Investasi RRT di Myanmar (2011).	44
---------------------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber FDI di Myanmar (2012).	44
Tabel 2. Klasifikasi Variabel RCT Terhadap Pembahasan	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Desa Myin Hlut Sebelum Operasi Pembersihan.....	33
Gambar 2. Desa Myin Hlut Sesudah Operasi Pembersihan	34
Gambar 3. Jalur Pipa Minyak dari Myanmar ke RRT	52
Gambar 4. Jalur Pelayaran RRT	53

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of South East Asia Nations
AIIB	: Asian Infrastruktire Investment Bank
CNPC	: China National Petroleum Corporation
CPC	: Communist Party of China
CPI	: China Power Investment
DK PBB	: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
FDI	: Foreign Direct Investment
HAM	: Hak Asasi Manusia
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
MICC	: Myanmar International Convention Center
MOGE	: Myanmar Oil and Gas Enterprise
MoU	: Memorandum of Understanding
NGO	: Non-Government
NORINCO	: China North Industries Corporation
OBOR	: One Belt One Road
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
RCT	: Rational Choice Theory
SDA	: Sumber Daya Alam
USDP	: The Union Solidarity and Development Party
UU	: Undang-Undang

UDHR : Universal Declaration of Human Rights

UNICEF : The United Nations Children's Fund

ABSTRAK

Kerjasama ekonomi dan politik yang dijalin sejak tahun 1950 oleh negara RRT dan Myanmar cukup membuktikan bahwa kedua negara memiliki hubungan yang sangat dekat. RRT selalu melakukan hal yang terbaik kepada Myanmar sebagai negara tetangga sekaligus negara persekutuannya. Terutama dalam permasalahan Rohingya, RRT memberikan tanggapan yang positif terkait kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya walaupun kebijakan tersebut mengarah pada tindakan genosida. RRT menganggap bahwa Myanmar mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa ada campur tangan dari negara lain. Padahal, pada kenyataannya RRT berusaha untuk menjaga citranya di mata Myanmar dengan cara mendukung kebijakan tersebut. Di balik dukungan tersebut, terselip kepentingan-kepentingan RRT di Myanmar terutama dalam bidang ekonomi dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya dan bagaimana Kebijakan Luar Negeri yang diterapkan RRT kepada Myanmar. Hasil analisis diperdalam dengan menggunakan *Rational Choice Theory* untuk dapat mengetahui bagaimana kepentingan-kepentingan RRT yang ada di Myanmar.

Kata Kunci: Kepentingan, RRT, Kebijakan, Myanmar, Rohingya.

ABSTRACT

People's Republic of China and Myanmar are two countries that have a very close relations. Their relations especially in economics and political cooperation has been established since 1950. PRC always give its support to Myanmar as a neighboring countries and as its alliance. Especially in the Rohingya issue, the PRC gave a positive response regarding the policies of the Myanmar government towards the Rohingya even though the policy led to acts of genocide. PRC considered that Myanmar was able to resolve the problem on its own without any interference from other countries. In fact, PRC is trying to maintain its image in the eyes of Myanmar by supporting Myanmar's policy. Behind this support, PRC's interests are tucked in especially in the economic and political fields. This research aim to find out how the policy of the government of Myanmar towards the Rohingya and how the Foreign Policy applied by PRC to Myanmar. The results of the analysis deepened by using Rational Choice Theory to be able to find out how PRC's interests exist in Myanmar.

Keywords: Interests, RRT, Policy, Myanmar, Rohingya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1950 Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) telah memiliki hubungan diplomatik sangat erat, bermula pada tahun 1949 di mana pengakuan Myanmar terhadap RRT hingga perayaan Ulang Tahun ke-68 berdirinya RRT yang diselenggarakan di Myanmar International Convention Center (MICC) di Nay Pyi Taw, Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dengan memiliki hubungan kerjasama yang cukup kuat terhadap RRT. Hal ini didukung dengan letak geografis Myanmar yang berbatasan langsung dengan RRT, sehingga dengan adanya letak geografis Myanmar yang berbatasan langsung dengan RRT memberikan keuntungan kerjasama bagi kedua negara dalam bidang ekonomi, politik, dan militer. Adanya penandatanganan perjanjian perdagangan pertama pada tahun 1954 hingga penandatanganan perbatasan RRT-Myanmar pada tahun 1960 adalah salah satu bukti yang menunjukkan mitra kerjasama RRT-Myanmar (Tech, 2017).

Kerjasama ekonomi antara RRT dan Myanmar bertujuan untuk dapat meningkatkan perekonomian kedua negara. hal ini cukup dibuktikan negara RRT sebagai investor utama Myanmar, di mana RRT menanamkan investasi sebesar US\$ 14,143 juta dengan total *Foreign Direct Investment* (FDI) sebesar 34,4% pada tahun 2012 (Karaman, 2014). Adapun bentuk investasi yang ditanamkan oleh RRT dinegara-negara Asia berupa makanan dan energi. Selain itu, RRT juga berinvestasi

di bidang pertambangan. Dengan adanya akses mudah dalam berinvestasi yang di dapatkan oleh RRT di negara Myanmar merupakan salah satu alasan mengapa RRT berinvestasi di negara Myanmar (The Guardian, 2012).

Dalam bidang militer, RRT telah menjadi pemasukan utama dalam pelatihan dan peralatan militer sejak tahun 1980. RRT juga memiliki kepentingan berupa menjaga stabilitas negaranya disepanjang perbatasan tersebut yakni dengan mengadakan kerjasama dengan militer, polisi, serta organisasi keamanan negara Myanmar (Clapp, 2015, pp. 4-5). Adapun bentuk kerjasama yang diberikan oleh RRT terhadap Myanmar berupa memberikan bantuan dalam membangun infrastruktur militer Myanmar di mana, RRT telah menyediakan beberapa fasilitas seperti senjata, tank, pesawat anti peluru, kapal angkatan laut, transportasi pesawat seperti helikopter, serta menyediakan fasilitas produksi tambang dan amunisi. Selain itu, Jia Chunwang, Menteri Keamanan Umum Myanmar telah melakukan kerjasama bilateral dalam keamanan perbatasan untuk memerangi isu perdagangan narkoba (Than, 2013, pp. 196-198).

Hubungan negara RRT dan Myanmar mengalami penurunan ketika negara Myanmar mengalami masa transisi politik dari pemerintahan Junta Militer menjadi negara yang lebih demokratis. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi negara RRT untuk dapat memperbaiki hubungan kedua negara. Hal ini bermula ketika negara Myanmar cenderung ingin menggunakan sistem politik dari Barat yang menganut nilai demokrasi. Sebelum mengalami masa transisi politik, negara Myanmar dikucilkan dari dunia internasional dan mendapatkan sanksi embargo. Hal ini dikarenakan, banyak terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dimulai dari terjadinya kekerasan yang dirasakan masyarakat sipil yang dilakukan

oleh militer Myanmar, pemutusan koneksi internet, adanya larangan terhadap media-media di Myanmar untuk memberikan tayangan mengenai informasi seputar dunia internasional, serta adanya penahanan terhadap tokoh pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi (South, 2004, pp. 235-237). Namun, banyaknya kecaman yang muncul terhadap negara Myanmar tidak membuat RRT membatasi hubungannya terhadap Myanmar. Justru sebaliknya, RRT memberikan pengaruh yang besar terhadap Myanmar yang ditandai dengan adanya perjanjian resmi *five principles of peaceful co-existence* pada tahun 1954 (Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China, N. a). RRT memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap negara Myanmar berupa pasokan sumber daya energi serta banyaknya proyek-proyek RRT di Myanmar membuat RRT menguatkan hubungan bilateralnya dengan Myanmar ditandai dengan adanya perjanjian tersebut.

Masa transisi politik Myanmar dimulai sejak tahun 2008 yang ditandai dengan disahkannya Republik Kesatuan Myanmar hingga adanya pemilu pada tahun 2010 hingga dibubarkannya pemerintahan Junta Militer pada 31 maret 2011 kemudian melantik Thein Sein menjadi presiden negara Myanmar. Pemilihan umum pertama yang dilakukan pada tanggal 7 november tahun 2010 ini di menangkan oleh The Union Solidarity and Development Party (USDP). USDP merupakan partai non-militer pertama yang memenangkan pemilihan umum pertama dipimpin oleh presiden Thein Sein.

Sejak dilantiknya Thein Sein menjadi presiden, perubahan banyak terjadi pada kebijakan luar negeri Myanmar seperti demokratisasi Myanmar. Sikap yang dilakukan Myanmar dalam membuka diri terhadap negara Barat cukup mempengaruhi hubungan bilateralnya dengan RRT, sehingga membuat investasi

RRT di Myanmar menurun secara drastis (Chan, 2013). Adanya kebijakan Thein Sein dalam memberhentikan proyek bendungan Myistone merupakan salah satu sikap yang menunjukkan adanya perubahan dalam kebijakan luar negeri Myanmar terhadap RRT. Hal ini sangat membuktikan bahwa Myanmar mulai melepaskan diri dari RRT dan menjalin hubungan yang lebih luas dengan negara Amerika Serikat (AS), kebijakan pemberhentian proyek ini akan sangat mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara (Sun, 2013).

RRT memiliki kepentingan utama berupa membangun jalur pipa minyak mentah yang dibangun di pantai Burma hingga jalur pipa tersebut menghubungkan teluk Bengal hingga ke barat daya, RRT-Mainland di mana jalur pipa minyak dan gas tersebut akan memberikan keuntungan-keuntungan tersendiri bagi RRT salah satunya yakni dapat meningkatkan perekonomian wilayah Kunming di RRT (Ramzy, 2017). Sedangkan kepentingan dalam bidang politik, RRT ingin menggeser pengaruh AS di Myanmar dan mengharap dukungan Myanmar terhadap posisinya dalam sengketa Laut China Selatan yang akan dipaparkan oleh penulis pada bab analisis. Oleh karena itu, tidak heran apabila RRT berupaya menjalin kerjasama dengan Myanmar jika dilihat dari kepentingannya terhadap negara Myanmar.

Dalam mempertahankan kepentingan negaranya, RRT berusaha untuk tetap menjaga hubungan bilateralnya dengan Myanmar untuk tetap terjalin dengan baik. Adapun usaha yang dilakukan RRT untuk menjaga hubungan bilateralnya dengan Myanmar yakni melalui cara diplomasi untuk mengurangi sentimen anti RRT yang dilakukan secara langsung terhadap masyarakat Myanmar (Kate, 2011). Kemudian RRT menunjukkan sikap-sikap baik terhadap Myanmar yang ditunjukkan melalui

dukungan RRT dalam kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya pada permasalahan domestik negara Myanmar. Etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang tinggal di Myanmar tepatnya di wilayah Rakhine di mana etnis ini didominasi oleh masyarakat Muslim dan menjadi etnis minoritas di Myanmar.

Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya bukan berasal dari negaranya walaupun di sisi lain Rohingya menganggap bahwa mereka adalah masyarakat Myanmar. Sebagai etnis minoritas di negara Myanmar membuat Rohingya mendapat perlakuan tidak baik dari masyarakat Myanmar maupun pemerintah Myanmar sendiri. Etnis Rohingya mengalami diskriminasi baik secara budaya maupun ekonomi, dari hal tersebut menimbulkan konflik etnis berkepanjangan di negara tersebut. (Wekke, 2016, p. 75). Sehingga pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan penolakan kewarganegaraan terhadap etnis Rohingya.

Penolakan negara Myanmar terhadap pemberian kewarganegaraan disebabkan karena etnis Rohingya tidak termasuk kedalam daftar etnis di Myanmar dan mereka tidak memenuhi syarat hukum untuk bisa mendapatkan status kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang kewarganegaraan pada tahun 1982 yang menegaskan bahwa apabila Rohingya ingin diberikan status kewarganegaraan maka etnis tersebut harus mampu memberikan bukti yang akurat bahwa mereka telah tinggal di Myanmar sebelum tahun 1823. Namun, yang terjadi adalah Rohingya tidak cukup memiliki bukti tersebut sehingga mereka tidak bisa mendapatkan status kewarganegaraan (Perlez, 2014). Adapun kebijakan pemerintah Myanmar dalam penolakan pemberian status kewarganegaraan kepada Rohingya ini didukung oleh RRT. Sehingga, RRT disinyalir memiliki kepentingan

terhadap negara Myanmar salah satunya dalam membangun jalur pipa minyak dan gas di wilayah Rakhine tempat Rohingya berada.

Dari apa yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik ingin memahami lebih lanjut terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Kemudian peneliti juga akan membahas kepentingan-kepentingan RRT terhadap Myanmar serta bagaimana kepentingan-kepentingan tersebut dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Analisis Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya Periode 2012-2017”**.

1.2 Rumusan Masalah

Jika dilihat dari latar belakang yang mengenai kepentingan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya, ada satu rumusan masalah yang ditarik : Mengapa kepentingan-kepentingan RRT dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kepentingan utama RRT di Myanmar.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya.

3. Untuk menganalisis bagaimana kepentingan RRT di anggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar.

1.4 Signifikansi

Topik dalam penelitian ini cukup penting untuk diteliti mengingat permasalahan etnis Rohingya tidak kunjung usai sejak tahun 1826 di mana negara Inggris mulai menguasai Myanmar pada Perang Dunia I. Kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya dalam menolak etnis tersebut mendapat banyak kecaman dari dunia internasional. Adapun kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya berupa kekerasan junta militer serta penolakan pemberian kewarganegaraan terhadap Rohingya. Peneliti melihat dari sisi dukungan yang diberikan oleh pemerintah RRT terhadap kebijakan pemerintah Myanmar dalam menolak keberadaan etnis Rohingya. Di lihat dari pernyataan dukungan dari Kementrian Luar Negeri hingga upaya yang dilakukan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar untuk menjalankan kepentingan-kepentingan RRT. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepentingan utama RRT berupa jalur pipa minyak dan gas yang dibangun dari Kyauk Phyu menuju wilayah Kunming.

Oleh karena itu, peneliti mencoba membahas dari sisi lain yaitu mengapa kepentingan-kepentingan RRT dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Tinjauan pustaka yang dilakukan oleh peneliti yang mana penelitian ini belum banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Hal inilah yang kemudian menjadi keunikan tersendiri dalam penelitian ini karena hingga saat ini belum ada penelitian yang membahas mengenai mengapa kepentingan RRT dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya.

Selain itu, penelitian ini akan melihat bagaimana kepentingan-kepentingan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian dengan topik isu Rohingya merupakan kajian yang sering diteliti dalam lingkup politik pemerintah RRT. Namun penelitian ini hanya akan memfokuskan pada tahun 2012 hingga 2017. Penulis mengambil periode 2012 hingga 2017 dikarenakan pada tahun 2012 merupakan puncak FDI RRT di Myanmar bersamaan dengan puncak penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat Rohingya. Pada tahun 2012, telah terjadi konflik agama antara masyarakat Rohingya yang mayoritasnya Muslim dengan masyarakat Rakhine yang beragama Budha. Kemudian militer Myanmar juga telah melakukan serangan pembalasan terhadap kelompok bersenjata Rohingya yang terjadi pada tahun 2016. Di dalam penelitian ini, peneliti akan membahas secara khusus bagaimana kepentingan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Untuk memperdalam analisis ini penulis akan mencoba menganalisis mengapa kepentingan-kepentingan tersebut dianggap sebagai salah satu alasan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Selain itu, peneliti juga akan membahas bagaimana kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Myanmar untuk mengusir etnis Rohingya dari negaranya.

1.6 Tinjauan Pustaka

Kepentingan RRT terhadap Myanmar :

Membahas mengenai hubungan baik antara RRT dan Myanmar di antara kawasan Asia Tenggara pada umumnya sangat erat jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang berada di kawasan tersebut. Tidak hanya karena letak geografisnya yang dekat, namun juga ditandai dengan persamaan agama, etnis, dan budaya. Jika dibandingkan dengan negara-negara dengan mayoritas agamanya Muslim seperti Indonesia dan Malaysia. Dalam hubungan bilateral yang baik antara RRT dan Myanmar, tentu saja terselip sebuah kepentingan RRT terhadap Myanmar. Kepentingan utama RRT terhadap Myanmar yang utama adalah kepentingan ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya proyek yang telah direalisasikan oleh pemerintah RRT seperti pembangunan transportasi minyak mentah dan gas alam dari Myanmar menuju RRT melalui pembuatan pipa dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Pada proyek kedua, RRT membangun bendungan hidroelektrik di sepanjang daerah aliran hulu Sungai Irrawaddy, Myanmar. Di mana pada proyek yang kedua ini membuat perdagangan ekonomi kedua negara semakin meningkat yakni ekspor RRT mencapai angka 53% pada tahun 2010, sedangkan impornya mencapai angka 49%. Dengan adanya perdagangan ekonomi kedua negara, sehingga RRT memainkan peran penting dalam perekonomian Myanmar, sehingga RRT memiliki strategi terkhusus untuk mengatur keuntungannya sendiri (Djelantik, 2015, pp. 261-262).

Dalam kerjasama untuk mencapai kepentingan RRT dan Myanmar dapat kita lihat bahwa keuntungan yang didapatkan oleh RRT dalam jangka panjang. Peran industri RRT di wilayah Asia ini sangatlah luas sehingga RRT dapat

dikatakan berhasil dalam mengekspor modal bisnisnya. RRT menggunakan hubungan ekonominya dengan Myanmar sebagai kebijakan luar negeri RRT, mengingat RRT menggunakan kekuatan yang dimilikinya dengan melayani berbagai macam kepentingan global untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang. RRT juga sangat memanfaatkan peluang investasi dengan Myanmar agar terhubung dengan negara-negara di Timur Tengah seperti India sebagai gerbang keuntungan negara RRT. Dari keterangan diatas dapat terlihat bahwa ada kepentingan RRT terhadap Myanmar sebagai penghubung jalannya RRT ke negara-negara Timur Tengah (Chan-Kim, 2016, pp. 1-16).

RRT dapat dikatakan menjadi pemeran utama dalam permainan ekonomi dunia dengan kurun waktu kurang lebih tiga dekade. Jika melihat dari sejarah perekonomian RRT sangat terlihat perubahan perekonomian RRT berkembang sejak Beijing meluncurkan diplomasi bantuan luar negeri pada saat berdirinya RRT pada tahun 1949. RRT memiliki keinginan untuk menantang negara AS dan Uni Soviet agar RRT mampu bersaing dengan negara-negara kuat lainnya. Hal ini sangat terlihat bahwa RRT ingin menguasai dunia setelah berusaha untuk menyebarkan pengaruhnya di wilayah Asia. Tidak hanya itu, RRT telah memberikan bantuan ekonomi pada sejumlah negara berkembang dengan tujuan agar mendapatkan dukungan dari negara-negara tersebut dan mengurangi pengaruh AS di kawasan Asia (Copper, 2016, p. 141).

Kebijakan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap Rohingya :

Etnis Rohingya pada mulanya berimigrasi dari negara India dan Bangladesh, terdapat kurang lebih 1,4 juta etnis Rohingya yang tinggal dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Namun, mayoritas etnis tersebut tinggal di Burma,

Myanmar. Etnis Rohingya, yang notabeneanya merupakan etnis minoritas di Myanmar ini telah mengalami penindasan sejak tahun 1948 walaupun mereka telah menempati tanah Rakhine sebelum kemerdekaan negara Myanmar. Adapun ancaman kekerasan terhadap Rohingya merupakan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Myanmar untuk mengusir etnis Rohingya melalui militer. Di mana, kebijakan pemerintah Myanmar yaitu dengan menerapkan kebijakan asimilasi secara paksa serta tidak mengakui adanya etnis tersebut. Laporan Amnesty International, menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya berupa kekerasan junta militer yang meliputi penolakan pemberian kewarganegaraan, pembatasan untuk berpindah, adanya pembatasan kegiatan ekonomi maupun pendidikan, serta maraknya pembunuhan, pelecehan, penyiksaan, dan kerusuhan anti Muslim Rohingya (Mitzy, 2014, pp. 154-155).

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya ini dianggap telah melanggar aturan hukum internasional. Hal ini dilihat dari adanya pelanggaran kewarganegaraan di mana Rohingya pada awalnya telah menempati negara Myanmar bahkan sebelum kemerdekaan Myanmar tahun 1898. Sikap pemerintah Myanmar dalam membiarkan Rohingya tidak memiliki identitas yang jelas telah melanggar UU Keimigrasian Tahun 1947 dan UU Kewarganegaraan Tahun 1982 yang sangat bertentangan dengan Konvensi Kewarganegaraan dan Konvensi Anti Diskriminasi. Di mana, dalam Konvensi tersebut menyebutkan bahwa terdapat larangan untuk negara-negara anggota yang cenderung melakukan diskriminasi perbedaan etnis maupun agama, sehingga mereka tidak memiliki hak yang sama dengan masyarakat lain pada umumnya dalam kehidupan bernegara. Pelanggaran lain yang dilakukan pemerintah Myanmar yakni, pemerintah

Myanmar membiarkan adanya konflik etnis yang terjadi antara Budha dan Rohingya yang menyebabkan ribuan nyawa warga Rohingya melayang. Pemerintah Myanmar dianggap melanggar karena tidak melaksanakan kewajiban internasional dalam mencegah kekerasan masyarakatnya. Adapun konflik tersebut justru melibatkan polisi dan tentara Myanmar dalam melakukan pembantaian terhadap Rohingya (Thontowi, 2013, p. 46).

Berdasarkan pada tulisan-tulisan di atas, topik penelitian mengenai Analisis Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya hanya fokus membahas persoalan kepentingan yang dimiliki RRT terhadap negara Myanmar dan kebijakan pemerintah Myanmar yang sangat diskriminatif terhadap etnis Rohingya. Namun, tidak banyak yang mencoba meneliti mengapa kepentingan RRT dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mencoba untuk menganalisis mengapa kepentingan-kepentingan RRT dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya.

1.7 Perspektif Teori/Konsep/Pendekatan

Rational Choice Theory :

Pada tulisan penelitian ini, peneliti akan menggunakan Teori Pilihan Rasional atau *Rational Choice Theory* (RCT). RCT pada awalnya muncul berdasarkan pada asumsi dasar dari perilaku aktor ekonomi. Asumsi tersebut memprediksi bahwa perilaku manusia selalu dimotivasi oleh uang dan keuntungan. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia pasti berdasarkan pada pemikiran rasional. Sebelum memutuskan sebuah tindakan, setiap individu pasti akan

memprediksi biaya yang dikeluarkan dan seberapa besar keuntungan yang akan didapatkan. RCT pertama kali dipopulerkan oleh James S. Coleman dalam jurnalnya yang berjudul *Rationality and Society* pada tahun 1989. James S. Coleman beranggapan bahwa RCT merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara rasional untuk melakukan sebuah tindakan yang berdasarkan pada tujuan tertentu. Di mana tujuan yang tersebut ditentukan oleh perhitungan, nilai, sebuah pilihan. Teori ini muncul dari ilmu ekonomi di lihat dari aktor dalam memilih sebuah tindakan untuk memaksimalkan keuntungan yang didapat serta meminimalisir resiko yang mungkin saja terjadi (Clark, 1996, pp. 293-294).

Coleman mengeluarkan dua unsur utama dalam teorinya yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya dalam teori Coleman berarti bahwa sesuatu yang menarik perhatian dan sumber daya tersebut dapat dikendalikan oleh aktor lain, yang dimaksud dengan aktor adalah seseorang yang memiliki peran dalam melakukan sebuah tindakan, yang mana tindakan tersebut dilakukan untuk sebuah tujuan. Dalam sistem sosial, setidaknya melibatkan dua aktor yang dapat mengendalikan sumber daya tersebut. Keberadaan sumber daya menjadi sebuah pengikat bagi kedua aktor dan menyebabkan sifat saling membutuhkan antara keduanya (Ritzer, 2008, p. 449).

Jika dilihat dari perspektif ilmu ekonomi dan politik, RCT diasumsikan sebagai aktor yang ingin mencapai kepentingannya. Aktor ini pada nantinya akan memanfaatkan peluang-peluang yang bisa di dapatkan untuk dapat mencapai kepentingannya dengan perhitungan-perhitungan untuk mendapatkan keuntungan yang besar dalam jangka panjang (Deliarnov, 2006, p. 134). Pada umumnya perilaku dari *rational action* ini memiliki sifat yang egois dengan segala

tindakannya yang berdasarkan perhitungan untuk menemukan cara yang lebih efisien dalam mencapai tujuannya. Sehingga, optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan kata kunci dari RCT. Seperti yang telah dirumuskan James B. Rule dalam terjemahannya sebagai berikut:

Tindakan manusia (human action) pada dasarnya adalah “instrumen” (dalam arti;alat bantu), agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sedikit banyaknya jarak jauh. Untuk manusia, atau untuk kesatuan yang lebih besar, tujuan atau nilai tersusun secara hierarkis yang mencerminkan prefensinya mengenai apa yang diinginkan atau diperlukannya. Hierarki prefensi ini relatif stabil. Para aktor merumuskan perilakunya melalui perhitungan rasional mengenai aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya. Informasi relevan yang dimiliki oleh aktor sangat mempengaruhi hasil dari perhitungannya. Proses-proses sosial berskala besar termasuk hal-hal besar seperti *ratings*, institusi dan praktik-praktik merupakan hasil dari kalkulasi seperti itu. Mungkin akibat dari pilihan kedua, pilihan ketiga, atau pilihan N perlu dilacak (Budiarjo, 2008, pp. 93-94).

Pada konsep dasar RCT definisi Rasional dalam RCT memiliki definisi yang berbeda dengan definisi rasional dalam bahasa keseharian. ‘Rasional’ yang dimaksud dalam RCT adalah kebijaksanaan dalam pemikiran yang kritis untuk dapat mengetahui dan melakukan hal apa yang dilakukan agar mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. RCT menggunakan definisi yang berfokus pada tindakan-tindakan individu yang menyeimbangkan antara kerugian (*cost*) dan keuntungan (*benefit*). Segala tindakan yang dilakukan oleh aktor dimaksudkan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Seluruh proses dalam mengambil sebuah tindakan ‘rasional’ yang dipikirkan melalui pemikiran secara nalar maupun diluar nalar tetap dianggap sebagai pemikiran secara ‘rasional’ (Rosidin, 2015, pp. 270-271). Dalam RCT, setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan perhitungan maupun pemikiran secara rasional pada akhirnya tetap akan mendapatkan keuntungan dan kerugian. Sehingga, penerapan mekanisme teori ini sangat mempertimbangkan antara keuntungan dan kerugian. Berikut poin-poin yang menjadi inti dari RCT sebagai berikut:

1. Aktor dalam pemikiran rasional akan bersikap seperti makhluk rasional yang berdasarkan pada perhitungan, kepentingan individu, kemudian melakukan tindakan secara maksimal agar meraih keuntungan dalam skala besar.
2. Aktor biasanya membuat lebih dari satu rancangan rencana agar tujuan mereka tetap berjalan apabila rencana awal tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.
3. Tindakan-tindakan yang dilakukan sepenuhnya untuk kesejahteraan sendiri (Ogu, 2013, p. 93).

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam mengambil pilihan rasional dalam RCT:

1. Menentukan objek dan menargetkan tujuan.
2. Mengidentifikasi adanya kendala yang kemungkinan akan terjadi.
3. Menentukan aturan keputusan yang nantinya dapat mengantisipasi apabila terdapat kendala.
4. Menentukan bagaimana aturan keputusan yang dapat diseimbangi oleh aktor tujuan.
5. Meneliti mengenai kondisi eksternal aktor yang aktor tuju dan dapat memprediksi konsekuensi dari kondisi tersebut.
6. Memeriksa langkah dalam melakukan prediksi.
7. Konsisten dengan tujuannya.
8. Memberikan kesimpulan dan konsekuensi apa saja yang akan diterima, dan bagaimana konsekuensi tersebut akan mempengaruhi kebijakan sebuah

negara. Kemudian membuat keputusan yang memberikan keuntungan optimal (Ogu, 2013, p. 94).

Akan tetapi, dalam tindakan RCT terdapat dua hal yang menjadi hambatan utama diantaranya kelangkaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Institusi Sosial. Dalam kelangkaan SDA, aktor yang membutuhkan lebih dari satu SDA yang berbeda maka aktor tersebut juga harus menyediakan akses SDA yang berbeda. Dalam mencapai satu tujuan tersebut, aktor harus memperhatikan biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan akses tersebut sehingga tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau SDA yang berbeda. Kemudian, hambatan dari Institusi Sosial dapat diartikan sebagai hambatan-hambatan dari berbagai institusional yang memiliki prinsip-prinsip positif maupun negatif dan dapat mendorong ataupun mencegah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor (Anshori, n.a , pp. 139-140).

Pemilihan RCT dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat sebab atau alasan dukungan yang diberikan pemerintah RRT terhadap kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Pada kenyataannya RRT telah mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politiknya. Hal ini sangat sesuai dengan penjelasan mengenai asumsi dasar RCT di mana perilaku dari rational action ini akan melakukan hal-hal yang diluar dugaan demi meraih keuntungan individu secara optimal. Terdapat dua variabel utama dalam RCT yaitu *cost and benefit*. Di mana, (*cost*) dapat dilihat dari konsekuensi yang di dapat oleh RRT yang menerapkan strategi untuk mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Namun, sikap tersebut tentu saja diambil melalui beberapa pertimbangan-pertimbangan negara dengan

hubungan luar agar mendapatkan keuntungan (*benefit*). Peneliti juga akan mengaitkan bagaimana dua hambatan utama dalam RCT terhadap proyek utama RRT di Myanmar. Penggunaan RCT sangat membantu untuk memperdalam analisis ini agar dapat mengetahui bagaimana usaha yang dilakukan RRT demi mendapatkan kepentingan ekonomi dan politiknya di Myanmar.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif, mengingat metode ini dianggap sebagai salah satu metode yang tepat untuk memenuhi tujuan penelitian. Karena penelitian ini membahas mengenai fenomena politik pemerintahan RRT maka, penelitian ini akan berisi analisis yang sifatnya deskriptif didukung dengan data-data yang akan disajikan oleh peneliti. Landasan teori yang digunakan juga akan sangat mempengaruhi metodologi penelitian sehingga keduanya harus saling berkaitan sebagai fungsi lain untuk memberikan gambaran secara umum.

Dalam penelitian kualitatif hasil dari penelitian ini tidak menggunakan berbagai macam prosedur angka dalam proses pengumpulan datanya. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis yang mendalam sehingga menggunakan proses berdasarkan pada perspektif objek yang ditampilkan dalam penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif ini pada umumnya menggunakan penjelasan dengan kata-kata kemudian disertakan dengan gambar-gambar sebagai sumber data dalam angka atau rekaman. Analisis ini juga

cenderung induktif dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti (Sugiarto, 2015, pp. 8-9).

Penelitian kualitatif ini lebih mengacu pada bagaimana cara mencari makna, pengertian, pemahaman mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang diangkat dalam penelitian kehidupan manusia yang terlibat langsung dalam permasalahan tersebut. Maupun tidak terlibat secara langsung dalam permasalahan yang sedang diteliti secara kontekstual dan secara menyeluruh. Penelitian ini tidak menggunakan cara dengan hanya mengumpulkan data sekali kemudian langsung mengolahnya sekaligus, melainkan dengan cara bertahap dari makna atau data-data yang dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung dari awal hingga akhir kegiatan dengan bersifat naratif dan holistik (Yusuf, 2017, p. 328).

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang berjudul Analisis Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya Periode 2012-2017 yaitu negara RRT dan negara Myanmar, serta etnis Rohingya sebagai etnis Muslim minoritas di Myanmar. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah RRT dalam kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya dianggap sebagai sebuah formalitas dalam menjalankan kepentingan-kepentingan negaranya di negara Myanmar. Selain itu, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya ini merupakan salah satu usaha yang dilakukan dalam mengusir etnis Rohingya yang notabeneanya menyebabkan pelanggaran HAM dan ribuan etnis Rohingya meninggal dunia.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Metode penelitian secara kualitatif ini peneliti akan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui pihak-pihak lain. Dalam artian data yang akan didapatkan berupa informasi yang dilakukan melalui data-data lapangan, sehingga peneliti hanya menggunakan data-data yang sudah terkumpul untuk penelitiannya. Peneliti hanya perlu meminta data tersebut, mengakses, dan mencatat data yang telah didapatkan (Istijanto, n. a, p. 38). Selain menggunakan buku, jurnal, majalah, dokumen, peneliti juga akan melakukan literatur yang akan bersangkutan dengan penelitian serta mengakses perpustakaan elektronik (e-library) seperti JSTOR, Sci-Hub.tw, Proquest, Libgen, maupun Portal Garuda, serta media relevan lainnya.

1.8.4 Proses Penelitian

Pada proses penelitian ini dimulai dengan melakukan kajian pustaka untuk memastikan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Tidak hanya itu, literatur review dilakukan untuk menemukan data-data penting yang nantinya akan diangkat kedalam penulisan skripsi serta untuk mengetahui bagaimana sisi keunikan pada penelitian ini. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, dokumen resmi, jurnal, maupun internet. Data yang didapatkan akan digunakan sebagai bahan-bahan penting untuk mendukung argumen peneliti. Setelah semua data sudah terkumpul, peneliti kembali mengolah data tersebut menjadi data sederhana dan mudah dipahami dalam penulisan skripsi, serta melakukan pendalaman analisa untuk dapat menemukan jawaban dari rumusan masalah yang telah diangkat dalam skripsi ini.

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP ROHINGYA

Sebagai etnis yang tidak diakui di negara Myanmar, etnis Rohingya mengalami perlakuan diskriminatif. Sikap diskriminatif ini dibuktikan dengan pemerintah Myanmar menolak keberadaan Rohingya dibawah kekuasaan presiden Thein Sein pada tahun 2013. Dengan adanya perlakuan diskriminatif inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat Rohingya mengungsi ke negara-negara tetangga Myanmar (JPNN, 2017). Penolakan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar merupakan permasalahan utama etnis Rohingya hingga saat ini. Adapun sikap diskriminatif yang dirasakan oleh Rohingya tidak hanya penolakan kewarganegaraan saja, bahkan pemerintah Myanmar memberlakukan kebijakan lain seperti pembatasan kebebasan untuk bepergian, pembatasan hak untuk menikah dan berkeluarga, pembatasan hak untuk beribadah, serta kebijakan pembatasan akses pendidikan dan kesehatan bagi warga Rohingya.

2.1 Kebijakan Penolakan Kewarganegaraan

Pemerintah Myanmar menganggap bahwa etnis Rohingya merupakan imigran gelap yang melintas batas dari negara Bangladesh (BBC News , 2018). Perbedaan bahasa, agama, dan fisik merupakan salah satu alasan pemerintah Myanmar untuk tidak mengakui etnis tersebut. Myanmar menghapus Rohingya dari daftar delapan etnis utama yakni Burmas, Kachin, Karen, Karenni, Chin,

Mon, Arakan, Shan, dan kelompok etnis lainnya. Penghapusan tersebut dikarenakan pemerintah Myanmar menganggap bahwa Rohingya bukan bagian etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum kemerdekaan negara Myanmar (Waluyo, 2013).

Hukum kewarganegaraan yang berlaku di Myanmar Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982. Didalam Undang-Undang tersebut terdapat tiga macam yang dapat dikategorikan sebagai warga negara Myanmar. Di antaranya yaitu warga negara penuh (*full citizenship*), warga asosiasi (*associate citizenship*), dan warga naturalisasi (*naturalized citizenship*) (UNHCR, 2018). Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982 juga memuat aturan mengenai bagaimana pemerintah Myanmar memberikan status kewarganegaraan atau menghapus status kewarganegaraan seseorang apabila telah melanggar aturan-aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Sehingga, aturan tersebut bersifat mutlak, legal, dan berkekuatan hukum. Dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 tersebut membuat etnis Rohingya semakin sulit untuk mendapatkan status kewarganegaraan yang resmi (Burma Citizenship Law , 1982).

Aturan warga negara penuh (*full citizenship*), adalah masyarakat yang telah lama tinggal di Myanmar sebelum tahun 1823 atau lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan asli Myanmar dan harus berasal dari salah satu etnis yang ada di Myanmar. Kategori ini akan memperoleh hak penuh sebagai warga negara dan mendapatkan kemudahan akses pelayanan publik. Aturan warga asosiasi (*associate citizenship*) adalah masyarakat Myanmar yang memperoleh status kewarganegaraannya melalui Union Citizenship Act 1948. Kemudian harus

kembali mendaftarkan diri sebagai kewarganegaraan Myanmar dengan batas waktu 15 oktober 1982 saat pergantian Undang-Undang Kewarganegaraan menjadi Burma Citizenship Law of 1982, dan tidak akan diterima apabila pendaftaran tersebut melewati batas yang telah ditentukan. Aturan warga naturalisasi (*naturalized citizenship*), adalah lebih kepada masyarakat Myanmar yang telah tinggal di Myanmar sebelum tanggal 4 januari 1948 kemudian seseorang tersebut baru mengajukan permohonan kewarganegaraan setelah tanggal tersebut. Namun, mereka harus bisa menunjukkan bukti-bukti yang kuat bahwa mereka atau orang tuanya telah tinggal di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948. Sedangkan etnis Rohingya tidak termasuk kedalam tiga kategori tersebut (Burma Citizenship Law, 1982). Pemerintah Myanmar juga berpendapat bahwa dengan ditetapkannya aturan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Myanmar untuk menjaga stabilitas negaranya. Selain itu, pemerintah Myanmar menetapkan etnis Rohingya sebagai warga asing, oleh sebab itulah etnis Rohingya dibatasi hak-haknya seperti adanya kebijakan pembatasan hak sosial. Pembatasan hak sosial yang dimaksud seperti pembatasan kebebasan untuk bepergian, hak untuk menikah dan berkeluarga, hak untuk beribadah, serta kebijakan pembatasan akses pendidikan dan kesehatan (Aljazeera, 2017).

Penolakan status kewarganegaraan ini tidak hanya berlaku pada orang dewasa saja, tetapi juga berlaku pada anak-anak. Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar Tahun 1982 sangat bertentangan dengan *Convention on the Rights of the Child* yang menyebutkan bahwa seorang anak yang baru lahir berhak mendapatkan nama, serta memiliki hak untuk

mendapatkan kewarganegaraan (UN Committee on the Rights of the Child (CRC), 2006). Padahal, pemerintah Myanmar telah meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1991 dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan status kewarganegaraan bagi anak yang lahir di negaranya. Berdasarkan hal inilah kebijakan pemerintah Myanmar dalam menolak memberikan kewarganegaraan pada etnis Rohingya dianggap bertentangan dengan hukum internasional.

2.2 Kebijakan Pembatasan Hak Sosial

Dalam kebijakan pembatasan hak sosial ini terdapat tiga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Myanmar yang meliputi pembatasan kebebasan untuk bepergian, pembatasan hak untuk menikah dan berkeluarga, serta pembatasan hak untuk beribadah.

2.2.1 Kebijakan pembatasan kebebasan untuk bepergian

Telah ditetapkan oleh pemerintah Myanmar pada tahun 2012 silam. Aturan pembatasan kebebasan untuk bepergian ini dibedakan antara masyarakat Muslim dan warga Rohingya. Aturan resmi kebijakan pembatasan kebebasan untuk bepergian ini ditujukan kepada warga Rohingya, sedangkan aturan tidak resmi dalam kebijakan ini ditujukan kepada kelompok masyarakat Muslim. Pemerintah Myanmar memiliki tujuan untuk menghindari adanya kekerasan antar kelompok serta menghambat pergerakan kelompok-kelompok Muslim di Myanmar (Amnesty International, 2017). Namun hal yang sangat disayangkan adalah kebijakan tersebut dilaksanakan secara diskriminatif dengan tujuan untuk memecahbelahkan kelompok-kelompok Muslim dengan masyarakat lainnya.

Hukum internasional menyatakan bahwa seseorang yang tinggal di sebuah wilayah sebuah negara memiliki hak untuk bepergian maupun pindah dan tinggal dalam sebuah wilayah (Barnidge, 2005). Aturan ini juga tertulis didalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada pasal ke-13 yang berisi:

- (1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
- (2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya (Mukadimah, 1948).

Selain itu, aturan mengenai hak untuk seseorang dalam kebebasan untuk bepergian juga ditulis dalam Kovenan International Hak Sipil dan Politik dalam pasal ke-12 yang diterjemahkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara, di dalam wilayah itu, memiliki hak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya.
- (2) Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negaranya sendiri.
- (3) Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan kecuali yang disediakan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (*order public*), kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan orang lain, dan konsisten dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam kovenan ini.
- (4) Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri (United Nations Human Rights , 1966).

Pemerintah Myanmar mengharuskan etnis Rohingya apabila ingin melewati batas kota dan negara untuk meminta surat izin resmi perjalanan dari petugas keamanan setempat. Apabila telah mendapatkan izin perjalanan yang sah maka batas maksimal waktu perjalanan hanya 45 hari. Surat izin tersebut hanya bisa didapatkan melalui tahap prosedur dan proses yang sangat lama. Apabila sudah mendapatkan surat sah perjalanan maka surat izin tersebut harus diberikan kepada tugas kemanan pada saat keberangkatan dan kedatangan pada tempat

tujuan. (The Registration of Foreigners ACT, 1940). Warga Rohingya yang hendak bepergian ke desa lain mendapatkan banyak permasalahan selain surat izin dan pemeriksaan yang ketat, namun mereka juga sangat rawan terhadap bahaya, ancaman-ancaman, serta kekerasan fisik dan pemerasan yang menghadang. Adanya pembatasan jam malam membuat mereka tidak bisa bepergian di malam hari, hal ini membuat pergerakan Rohingya sangat terbatas akibat adanya aturan pembatasan untuk bepergian.

2.2.2 Kebijakan pembatasan hak menikah dan berkeluarga

Selain pembatasan kebebasan untuk bepergian, kebijakan lain seperti pembatasan hak menikah dan berkeluarga juga diberlakukan pemerintah Myanmar untuk Rohingya. Pemerintah Myanmar membuat peraturan yang mewajibkan pasangan Rohingya yang ingin menikah untuk mengajukan surat izin resmi dari pemerintah Myanmar sebelum memperoleh surat nikah. Selain itu, pasangan yang ingin menikah juga wajib membayar biaya tidak resmi sebesar 200.000 Kyat. Apabila ingin menikahi seseorang yang berasal dari kota lain maka harus membayar biaya tambahan dengan angka yang sama sehingga terhitung dua kali lipat lebih besar. Pasangan yang ingin menikah juga harus mengajukan permohonan nikahnya dan menunggu waktu kurang lebih dua tahun agar pengajuan permohonan izin nikahnya untuk dapat disetujui. Pemerintah Myanmar beranggapan bahwa hal ini dilakukan untuk mengurangi angka populasi Rohingya yang berada di Myanmar (Amnesty International , 2004). Berdasarkan pada Universal Declaration of Human Rights (UDHR) pada pasal ke 16 yang menyatakan bahwa:

1. *Men and woman of full age, without any limitation due to race, nationality of religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution.*
2. *Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses.*
3. *The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the state* (Universal Declaration of Human Rights , n. a).

Berdasarkan pada apa yang telah disebutkan dalam UDHR mengenai hak-hak bagi pria dan wanita dewasa untuk dapat berkeluarga sangatlah berbeda dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Myanmar. Ketika ditinjau dan mengaitkan isi dari UDHR dan mengaitkannya pada permasalahan Rohingya yang notabeneanya etnis tersebut tidak memiliki status kewarganegaraan yang resmi sebagai warga negara Myanmar, hal ini sangat memungkinkan sebagai salah satu cara yang dilakukan pemerintah Myanmar untuk mengurangi jumlah Rohingya, dan untuk menekan angka keturunan dari masyarakat Rohingya.

Syarat permohonan pernikahan bagi pasangan Rohingya wajib memberikan foto kedua mempelai yang ingin menikah, dimana pada foto pria wajib mencukur bersih kumis dan jenggotnya. Sedangkan pihak wanita, terdapat larangan menggunakan jilbab karena dianggap menutupi wajah, foto wanita wajib memperlihatkan seluruh wajahnya secara detail tanpa penutup kepala. Kebijakan ini dianggap sangat memberatkan pihak wanita dan bertentangan dengan aturan agama Islam, dimana bagi wanita diwajibkan untuk menutupi auratnya. Selain itu, pihak wanita wajib di tes kehamilan sebelum mengajukan permohonan tersebut (Lowenstein, 2015).

Kemudian ada aturan pembatasan hak untuk berkeluarga ditetapkan oleh pemerintah Myanmar untuk Rohingya. Pemerintah menetapkan program dua orang anak untuk setiap pasangan suami istri (The Guardian , 2013), sehingga dengan adanya aturan ini membuat para wanita Rohingya terpaksa melakukan aborsi.

Praktek aborsi tergolong illegal dan sangat membahayakan bagi keselamatan wanita Rohingya. Praktek aborsi yang dilakukan menggunakan metode tongkat yang dimasukkan ke Rahim maupun menggunakan obat untuk menggugurkan kandungan (Human Right Watch , 2013). Dengan adanya kebijakan-kebijakan inilah yang menunjukkan sebuah cara dari pemerintah Myanmar untuk menekan jumlah populasi Rohingya.

2.2.3 Kebijakan pembatasan hak untuk beribadah

Dalam konflik agama antara Muslim dan Buddha di Myanmar, pemerintah Myanmar ikut andil dalam adanya konflik tersebut. Bahkan dalam konflik agama tersebut berujung pada penghancuran tempat ibadah Umat Muslim dan tidak diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah. Dalam pasal 18 UDHR menjelaskan bahwa setiap invididu memiliki kebebasan hak untuk beragama seperti berikut:

Everyone has the right freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and public or private, to manifest his religion or belief teaching, practice, worship, and observance (United Nations Universal Decralation of Human Rights, 1948).

Terdapat deklarasi mengenai hak-hak penduduk termasuk etnis minoritas berdasarkan pada kewarganegaraan, etnis, agama dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 26 Kovenan International mengenai Hak Sipil dan Politik luas. (Pasal 2) berisi mengenai semua kedudukan atau kalangan tidak dibedakan didepan hukum, mereka mempunyai hak yang sama tanpa ada perlakuan diskriminasi apapun atas perlindungan hukum yang tidak dibedakan. (Pasal 26) berisi bahwa pasal 2 berlaku terhadap siapapun tanpa melihat latar belakang individu tersebut. Kovenan ini menjelaskan mengenai jaminan dalam kebebasan beragama untuk semua orang,

jaminan hak beragama ini tidak hanya berlaku bagi kelompok mayoritas saja. Pada prinsipnya adalah tidak boleh ada pembedaan perlakuan terhadap etnis minoritas tertentu (Fadhli, 2014, p. 362).

Namun, pada kasus ini kenyataannya etnis Rohingya tidak diberikan hak kebebasan untuk beribadah sehingga berdampak pada munculnya sentimen anti Muslim di Myanmar. Tidak hanya Masjid, namun sekolah-sekolah yang berada di wilayah Rakhine juga menjadi sasaran penghancuran untuk dibangun kantor administrasi pemerintah setempat (Amnesty International , 2016). Aparat kepolisian dan militer Myanmar yang bertugas di wilayah konflik juga turut melakukan kekerasan terhadap Umat Muslim yang terlibat bentrok dengan Umat Buddha, seakan-akan polisi dan militer Myanmar membiarkan kekerasan pada Umat Muslim terjadi. Bahkan tidak sedikit aparat yang hanya berdiam diri ketika kelompok radikal Buddha membakar perkampungan Rohingya (BBC Indonesia , 2012).

Muslim Rohingya dilarang melaksanakan ibadah bulan puasa seperti melakukan shalat Tarawih karena pemerintah Myanmar melarang warga Rohingya untuk dapat berkumpul lebih dari lima orang. Jika ada ada yang melanggar aturan tersebut maka para pelanggar aturan akan diberikan hukuman. Pemerintah Myanmar melarang adanya kegiatan shalat berjamaah serta melarang untuk menjalankan tradisi silaturahmi sebagai Umat Muslim pada Hari Raya Idul Fitri (Suastha, 2017). Larangan ini hanya diberlakukan pada etnis Rohingya, berbeda dengan Umat beragama lainnya seperti Agama Buddha yang tetap bisa melaksanakan kegiatan beribadah dengan tenang.

2.3 Kebijakan Pembatasan Akses Pendidikan dan Kesehatan

Akibat adanya pembatasan hak untuk bepergian, menghambat warga Rohingya untuk dapat bepergian ke sekolah maupun Universitas. Sekolah-sekolah yang berdiri di wilayah Rakhine juga dihancurkan akibat konflik agama antara Muslim dan Buddha. Sementara itu, hanya ada satu sekolah dasar dapat digunakan untuk proses belajar yang berlokasi di kota Sittwe, sekolah itu pun dapat dikatakan jauh dari kata layak. Sekolah yang dibangun melalui bantuan organisasi ini masih banyak ruangan kelas yang belum terisi dengan fasilitas seperti meja, kursi, papan tulis untuk belajar. Hanya sedikit ruangan kelas yang terisi dengan kursi dan meja yang terbatas sehingga banyak siswa-siswa disekolah dasar tersebut duduk dilantai (Carrol, 2014).

Tidak jarang bantuan yang dilakukan oleh organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan The United Nations Children's Fund (UNICEF) sebagai tenaga pengajar yang dilakukan secara sukarela di kamp-kamp tempat pemukiman Rohingya. Peningkatan penindasan dan penganiayaan yang memuncak pada tahun 2012 silam membuat pemuda Rohingya sulit untuk dapat melanjutkan studi mereka. Pemerintah juga menetapkan bahwa warga negara yang diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan dari pendidikan menengah ke atas ke perguruan tinggi hanyalah warga negara Myanmar (Nicosia, 2017). Selain karena larangan yang diberlakukan oleh pemerintah setempat, faktor ekonomi masyarakat Rohingya yang relatif rendah juga penyebab dari sulitnya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Adapun faktor ekonomi yang rendah ini merupakan dampak dari penerapan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah Myanmar seperti kebijakan penolakan kewarganegaraan dan kebijakan pembatasan untuk

bepergian. Kebijakan tersebut menghambat masyarakat Rohingya untuk mendapatkan pekerjaan.

Selain dengan memberlakukan pembatasan akses pendidikan, pemerintah Myanmar telah memberlakukan pembatasan akses kesehatan. Sehingga sejumlah badan PBB dan Non-Government (NGO) telah lama beroperasi di wilayah Rakhine Utara untuk memberikan bantuan-bantuan berupa obat-obatan dan beberapa alat kesehatan, bahan pangan untuk Rohingya. Padahal banyak warga Rohingya yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dari pemerintah setempat. Hal ini dapat membuat wabah penyakit sehingga dikhawatirkan wabah penyakit seperti HIV Aids akan meluas dan berujung kematian apabila tidak ditangani dengan benar. Khususnya pada ibu hamil dan anak-anak berumur di bawah lima tahun membutuhkan asupan gizi yang baik agar tumbuh kembangnya menjadi baik (Human Rights Watch , 2016). Pemerintah Myanmar juga memblokir masuknya bantuan-bantuan kemanusiaan untuk Rohingya. Pemblokiran ini akan sangat berdampak pada program untuk pemenuhan kebutuhan gizi pada anak kecil dan ibu hamil, dimana pemerintah Myanmar membatasi hanya sekitar 37.000 bantuan pangan yang masuk, sementara tercatat sekitar 50.000 warga Rohingya belum mendapat bantuan pangan. Selain itu tenaga medis yang secara sukarela membantu warga Rohingya juga dipaksa oleh pemerintah untuk berhenti dalam melakukan pelayanan kesehatan. Akibatnya, warga Rohingya yang dibatasi hak bepergiannya tidak bisa pergi ke rumah sakit walaupun dalam keadaan darurat sekalipun (Medecins Sans Frontieres (MSF), 2013).

2.4 Kebijakan Pengusiran

Tekanan pemerintah Myanmar dan masyarakat Myanmar terhadap Rohingya semakin meningkat. Konflik antara masyarakat Rohingya dengan etnis asli dari Rakhine tidak menemukan titik terang yang jelas sehingga konflik ini berkepanjangan. Ratusan ribu warga Rohingya meninggalkan Myanmar dan menuju negara-negara yang lebih layak untuk mendapatkan tempat tinggal. Salah satu negara tetangga Myanmar yang banyak dikunjungi Rohingya yakni Bangladesh. Akan tetapi Bangladesh menolak akan kehadiran Rohingya dengan alasan kepadatan penduduk. Penolakan Bangladesh terhadap Rohingya ditunjukkan dengan menolak bantuan asing untuk Rohingya. Saat ini tercatat kurang lebih 809.000 Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh untuk berlindung (The Guardian , 2017).

Kebijakan pengusiran pemerintah Myanmar yang mengarah pada tindakan genosida ini menyebabkan isu *ethnic cleansing*. Tindakan genosida ini berlangsung selama bertahun-tahun menggunakan teror pemusnahan terhadap masyarakat Rohingya kemudian berakibat pada maraknya pembunuhan serta pembakaran pada masyarakat Rohingya. Genosida merupakan sebuah kejahatan manusia di mana kejahatan tersebut bertujuan untuk memusnahkan etnis Rohingya dengan cara melakukan pengusiran, penyiksaan, pembunuhan, pembakaran yang dilakukan secara sengaja dengan motif adanya perbedaan suku maupun agama, hal inilah yang terjadi pada Rohingya (Shaw, 2015, p. 1).

Selain melibatkan militer negara, pemerintah Myanmar juga melibatkan mayoritas penduduk Myanmar untuk terlibat dalam genosida Rohingya, hal ini merupakan langkah penting kerjasama antara militer dan penduduk mayoritas

dalam mengusir Rohingya. Genosida besar-besaran pada etnis Rohingya tidak akan terjadi tanpa adanya rencana dan persiapan yang matang dari pemerintah Myanmar itu demi mencapai tujuan pengusiran Rohingya dari Myanmar yang dilakukan secara perlahan (Green, 2015, pp. 21-23).

Adapun *ethnic cleansing* merupakan dampak diberlakukannya kebijakan pengusiran pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. *Ethnic cleansing* dapat diartikan sebagai upaya pembersihan wilayah termiskin di Myanmar tepatnya di wilayah Rakhine. Pembersihan etnis ini dilakukan pada bulan Juni pada tahun 2012 dimana pemerintah mulai melenyapkan masjid-masjid yang berdiri hingga melakukan kekerasan massal. Pembersihan etnis ini menyebabkan masyarakat Rohingya kehilangan tempat tinggal mereka, sehingga tidak sedikit masyarakat Rohingya melarikan diri (Buncombe, 2012).

Dalam beberapa kasus, serangan yang dilakukan secara serentak ini dilakukan dengan sembilan lokasi yang berjauhan seperti Pauktaw, Mrauk-U, Myebon, Kyauk Pyu, Ramree, Kyauktaw, Minbya, Rathedaung, dan Thandwe. Tercatat sekitar empat kota yang berada di wilayah Sittwe dibakar habis dan hampir seluruh struktur kota hancur akibat adanya pembakaran tersebut, masyarakat Rohingya yang tinggal di wilayah Sittwe melarikan diri ke Kyauk Pyu untuk menyelamatkan diri mereka. Tidak hanya itu, militer Myanmar juga melakukan penembakan dari udara dan memukuli puluhan orang-orang Rohingya. Sedangkan masyarakat Arakan menyerang etnis Rohingya menggunakan pedang, senjata buatan, serta bom Molotov. Wilayah permukiman Rohingya yang lain, tepatnya desa Yan Thei di Mrauk-U Township mengalami kehancuran sebesar 100% sehingga dapat

dipastikan bahwa tidak ada satu bangunan pun yang berdiri di wilayah tersebut (Human Rights Watch , 2012).

Serangan yang paling mematikan terjadi pada bulan oktober tahun 2012, di mana sedikitnya dalam pembantaian yang dilakukan setiap hari tersebut memakan 70 korban orang Rohingya di desa Yan Thei. Termasuk diantaranya memakan korban anak-anak dibawah umur sebanyak 28 orang, dan perempuan-perempuan yang dibunuh secara sadis. Selain itu, untuk menghilangkan bukti kejahatan tersebut, pasukan keamanan negara Myanmar melakukan pembuangan mayat dan penguburan massal, serta melakukan pemerataan tanah makam menggunakan alat berat untuk menghilangkan bukti pemakaman massal (Human Rights Watch, 2013). Selain itu, penghapusan desa di bagian Rakhine juga terjadi pada desa Myin Hlut yang terjadi pada tanggal 16 desember 2017. Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini, gambar tersebut menunjukkan lokasi desa Myin Hlut sebelum dan sesudah operasi pembersihan.

Gambar 2.1 Desa Myin Hlut Sebelum Operasi Pembersihan 16 Desember 2017



Sumber : (Human Rights Watch , 2018)

Gambar 2.2 Desa Myin Hlut Sesudah Operasi Pembersihan 13 Februari 2018



Sumber : (Human Rights Watch , 2018)

BAB III

KEBIJAKAN LUAR NEGERI RRT TERHADAP MYANMAR

Bab III, peneliti akan memaparkan bagaimana Kebijakan Luar Negeri RRT terhadap Myanmar dibawah masa pemerintah Xi Jinping. Dalam bab ini, peneliti membagi ke dalam dua sub-bab. Sub-bab yang pertama akan menjelaskan bagaimana Kebijakan Luar Negeri ekonomi RRT terhadap Myanmar. Pada sub-bab yang kedua, peneliti akan menjelaskan bagaimana Kebijakan Luar Negeri politik RRT terhadap Myanmar. Dalam bab ini, peneliti hanya akan menjelaskan Kebijakan Luar Negeri RRT terhadap Myanmar yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingannya di Myanmar.

3.1 Kebijakan Ekonomi

Dibawah masa pemerintahan presiden RRT Xi Jinping (2013-sekarang), Xi Jinping memberlakukan kebijakan luar negeri One Belt, One Road (OBOR) yang diumumkan pada akhir tahun 2013. Presiden Xi Jinping memiliki visi untuk melakukan pembangunan infrastruktur untuk dapat menghubungkan daerah perbatasan RRT dengan negara-negara tetangga. Hal tersebut dimaksudkan untuk dapat mengembangkan perekonomian di daerah perbatasan RRT dengan cara menghubungkan daerah tersebut dengan Eropa melalui Asia Tengah, rute ini disebut dengan *The New Silk Road Economic Belt*. Tujuan pembuatan OBOR adalah untuk mencapai koordinasi kebijakan di negara-negara OBOR. Untuk membangun konektivitas RRT dengan negara-negara OBOR, RRT membangun infrastruktur, meningkatkan arus investasi dan perdagangan, melakukan promosi

integrasi keuangan, serta menjalin hubungan dengan lebih baik lagi bersama negara-negara OBOR (Ramadhan, 2018, pp. 140-141).

Namun, sebenarnya tujuan utama RRT dalam kebijakan OBOR adalah untuk memiliki jalan raya, jalur kereta api, telekomunikasi melalui udara, jaringan pelabuhan di seluruh wilayah OBOR serta cadangan minyak dan gas yang berkualitas tinggi. Dalam kebijakan OBOR, RRT menyebutkan bahwa negara-negara disepanjang jalur OBOR perlu memperbaiki infrastruktur kawasan, meningkatkan fasilitas investasi dan perdagangan, membangun jaringan perdagangan bebas, memperdalam kepercayaan politik, meningkatkan pertukaran budaya. Selain itu, isi dari kebijakan OBOR juga menyebutkan bahwa negara-negara OBOR harus saling mendorong satu sama lain belajar bersama dengan tujuan perkembangan masing-masing negara. Terakhir, negara-negara OBOR juga harus saling mempromosikan perdamaian (The Belt & Road Initiative, 2016, p. 3).

Presiden Xi Jinping juga melakukan pendekatan hubungan antara RRT dengan komunitas Association of South East Asia Nations (ASEAN) melalui Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 untuk mempromosikan kerjasama maritim antara RRT dan ASEAN. Selain itu, presiden Xi Jinping juga mengajukan pembentukan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendanai infrastruktur serta untuk mempromosikan integrasi ekonomi dan interkoneksi regional. Jalur Sutra Maritim ini dibuat dengan tujuan untuk memperkuat hubungan Asia Tenggara dengan Asia Selatan pada keamanan perdagangan maritim. Rencana ini bertujuan untuk dapat merealisasikan rencana Jalur Sutra Kuno yang sebelumnya belum dapat terealisasikan seperti jalur kereta cepat, pelabuhan dan jalur pipa minyak dan gas

yang membentang dikawasan Asia, serta jalur kendaraan darat (Kartini, 2015, p. 134).

Jalur Sutra baru muncul berdasarkan pada perubahan struktural ekonomi menjadi “keadaan normal baru” dari pertumbuhan ekonomi Asia yang lambat sehingga akan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi kawasan Asia. Terlebih, RRT memiliki perubahan startegi dalam menerapkan kebijakan luar negerinya yaitu dengan memprioritaskan hubungan dengan negara-negara tetangga RRT. Dalam hubungan antara RRT dan Asia Tenggara, RRT memiliki peranan penting pada posisinya. OBOR merupakan salah satu pilar kebijakan luar negeri RRT diwilayah Asia Tenggara, pada kenyataannya OBOR mencakup tiga negara ASEAN sebagai jalur OBORnya. Misalnya, provinsi Yunnan yang berbatasan langsung dengan Myanmar, Laos, dan Vietnam memprioritaskan konektivitas transportasi antar kawasan dengan negara-negara ASEAN. Konektivitas ini dapat memperkuat perekonomian RRT melalui tiga negara tersebut untuk dapat memperkuat RRT dalam memperoleh kepentingannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya konektivitas yang telah dicapai oleh provinsi Yunnan dan Asia Tenggara dengan adanya rangkaian jalur kereta. Jalur kereta ini melewati jalur timur pada negara Vietnam, jalur tengah ke Viantine pada negara Laos, dan jalur barat pada negara Myanmar (Kartini, 2015, pp. 135-136).

Kebijakan OBOR dianggap memiliki potensi pada pertumbuhan perdagangan RRT dan untuk mendapatkan sumber daya alam yang strategis, terutama di negara Myanmar. RRT juga telah membangun jalur akses energi untuk dapat mempermudah melakukan pengiriman minyak mentah dan gas alam dari Myanmar. Sumber daya energi yang dimiliki oleh Myanmar berpotensi dalam

mempermudah industri RRT dalam rantai produksi maupun distribusi, serta dapat memajukan pendapatan ekonomi RRT (Mustafic, 2016, pp. 156-157). Sehingga, kebijakan OBOR dianggap mampu menjadi peluang potensial bagi RRT untuk mencapai kepentingan dalam mendapatkan tambahan sumber daya energi dalam hal untuk memenuhi kebutuhan energi minyak dan gas bumi melalui pembangunan pipa minyak dan gas yang di bangun di Myanmar.

3.2 Kebijakan Politik

Kebijakan Luar Negeri politik dimasa pemerintahan presiden Xi Jinping memiliki sistem yang berbeda dari masa pemerintahan sebelumnya. Di mana, pada masa pemerintahan Hu Jintao (2005-2013) kebijakan Luar Negeri RRT lebih menerapkan kebijakan sosial ekonomi. Konsep sosial ekonomi dimasa Hu Jintao lebih berfokus pada kesejahteraan sosial, dan meningkatkan sistem demokrasi dengan menciptakan masyarakat yang harmonis (Buhi, 2014, p. 244). Sedangkan Kebijakan Luar Negeri presiden Xi Jinping lebih meningkatkan budaya damai yang dilakukan melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Kebijakan Luar Negeri yang digunakan oleh presiden Xi Jinping lebih menganut dan meneruskan budaya tradisional secara turun menurun (Sorensen, 2015, p. 59).

Presiden Xi Jinping optimis bahwa RRT sangat mampu berkompetisi dengan dunia internasional secara maksimal, dengan cara berupaya keras untuk meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional. Kebijakan Luar Negeri RRT menerapkan kebijakan damai yang independen. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan RRT yang lebih mandiri dan berdaulat. Untuk meningkatkan perannya di dunia internasional, RRT telah menerapkan sifat yang terbuka dan lebih modern

untuk mencapai perubahan yang lebih baik lagi (Liangyu, 2017). Pada Kebijakan Luar Negerinya, Xi Jinping menerapkan prinsip-prinsip untuk kelangsungan hidup negaranya sebagai berikut:

1. Hidup damai secara berdampingan.
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial.
3. Menerapkan sistem non-intervensi.
4. Menjalin kerjasama dengan negara berkembang, dan
5. Menjalin kerjasama multilateral (Swaine, n.a , pp. 4-7).

Tujuan utama dari politik Luar Negeri RRT lebih mengutamakan pada kepentingan dan kemajuan bersama dalam sebuah kerjasama. Dengan adanya kerjasama yang dijalin, RRT berharap bahwa kerjasama ini dapat meningkatkan pengaruhnya terhadap negara yang bekerjasama dengan RRT. Namun, keuntungan yang didapatkan tetap dapat dirasakan oleh kedua negara. Oleh karena itu, kebijakan Luar Negeri RRT lebih mengutamakan kerjasama dengan berbagai negara di penjuru dunia termasuk negara-negara berkembang, sebagai salah satu bentuk keterbukaan RRT (Yin, 2017). Kemandirian sebuah negara merupakan landasan dasar bagi RRT untuk menyebarluaskan kiprahnya di dunia internasional. Hal ini menjadikan RRT sebagai negara yang disiplin dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negaranya. Bentuk ketegasan tersebut menjadikan salah satu karakteristik bagi kebijakan Luar Negeri RRT. Seperti halnya, konsistensi RRT untuk tidak mencampuri permasalahan domestik Myanmar dalam isu Rohingya.

Untuk menjaga hubungan baiknya dengan Myanmar, RRT memilih untuk tidak mencampuri urusan domestik negara Myanmar, terutama isu sensitif sebuah

negara. Dalam permasalahan Rohingya, RRT bersikap untuk mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Kemudian, RRT juga tidak bergabung dengan negara-negara lain yang mengecam tindakan pemerintah Myanmar. RRT juga berharap bahwa permasalahan Rohingya dapat terselesaikan melalui jalan perdamaian. RRT lebih menghargai tindakan yang dilakukan oleh Myanmar, karena Myanmar dianggap lebih berwenang dan mengerti bagaimana cara menyelesaikan permasalahan domestik negaranya sendiri. RRT juga beranggapan bahwa dengan campur tangan negara lain dalam permasalahan Rohingya tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, yang ada hanya dapat mempersulit dalam menyelesaikan permasalahan (Bodeen, 2017).

Di sisi lain, dukungan yang diberikan RRT terhadap pemerintah Myanmar dimanfaatkan oleh RRT untuk menggeser pengaruh Amerika dalam mencapai kepentingan luar negerinya. Adapun bentuk dukungan politik RRT terkait isu Rohingya adalah, RRT mengusulkan rencana ‘tiga fase’ untuk dapat menyelesaikan permasalahan pengungsi Rohingya antara negara Myanmar dan Bangladesh. Permasalahan ini pada awalnya disebabkan karena permasalahan Rohingya membuat banyak warga Rohingya mengungsi di negara Bangladesh. Kondisi Bangladesh sendiri telah mengalami *over population*, sehingga permasalahan Rohingya ini dianggap dapat merugikan Bangladesh. Untuk itu, RRT memfasilitasi dialog perdamaian antara Myanmar dan Bangladesh (Peng, 2018).

Adapun rencana ‘tiga fase’ yang diusulkan oleh RRT adalah *pertama*, RRT mengajukan agar kedua negara melakukan gencatan senjata. *kedua*, RRT berharap bahwa masyarakat internasional harus mendukung negara Myanmar dan Bangladesh untuk dapat berhubungan dengan baik sebagai salah satu bentuk solusi

permasalahan Rohingya. *Ketiga*, terkait permasalahan Rohingya, solusi penyelesaian permasalahan tersebut harus dalam waktu jangka panjang. RRT beranggapan bahwa kemiskinan merupakan akar penyebab dari permasalahan tersebut, sehingga RRT menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Rakhine (Yamei, 2017).

Jadi, Kebijakan Luar Negeri RRT terhadap Myanmar terkait isu Rohingya adalah dengan memegang teguh prinsip Luar Negeri RRT dengan tidak mencampuri permasalahan domestik negara lain. Namun, di sisi lain RRT memberikan dukungan politik terhadap Myanmar. Salah satu dukungan politik RRT terhadap Myanmar adalah dengan mengusulkan rencana ‘tiga fase’ terhadap permasalahan Myanmar-Bangladesh. Bagi RRT upaya yang dilakukan ini merupakan hal yang dilakukan untuk dapat meningkatkan citranya di Myanmar dan dapat meningkatkan hubungan kerjasama kedua negara. RRT menganggap bahwa negara Myanmar adalah komponen kunci dari jangkauan strategis RRT ke Samudera Hindia. Mengingat kedua negara juga saling membutuhkan satu sama lain dan hubungan kedua negara cenderung terus bergerak tiap tahunnya. Selain itu, RRT juga bertujuan untuk mendominasi pengaruhnya di Myanmar.

BAB IV

**ANALISIS KEPENTINGAN RRT DALAM MENDUKUNG
KEBIJAKAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP
ROHINGYA**

Pada bab terakhir, akan memaparkan mengenai hasil temuan-temuan dari penulisan skripsi ini. Pada bab analisis, peneliti akan membagi kedalam enam sub-bab. Pertama, peneliti akan sedikit membahas mengenai contoh kerjasama RRT dan Myanmar dalam bidang ekonomi dan politik sebagai gambaran kedekatan kedua negara. Setelahnya peneliti akan menjelaskan dukungan RRT terhadap kebijakan pemerintah Myanmar. Kemudian akan memaparkan kepentingan-kepentingan RRT yang ada di Myanmar dalam bidang ekonomi dan politik diikuti dengan bukti-bukti dari dua kepentingan tersebut. Terakhir, akan menjelaskan hasil analisa dengan menggunakan *Rational Choice Theory* atau Teori Pilihan Rasional untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti.

Teori Rational Choice merupakan teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai bagaimana mengambil sebuah keputusan untuk mencapai tujuan tertentu secara maksimal. Dalam konteks negara biasanya keputusan tersebut dibuat untuk mencapai tujuan tertentu atau berdasarkan dari kepentingan negara dengan melakukan berbagai pertimbangan-pertimbangan demi mendapatkan keuntungan yang maksimal baik yang bersifat politis maupun tidak (Arjawa, 2014, p. 51). Pertimbangan-pertimbangan tersebut harus berdasarkan *cost and benefit*. Selain itu, peneliti juga akan menuliskan bagaimana hambatan-hambatan yang dialami oleh RRT dalam menjalankan kepentingannya di Myanmar. Sehingga

peneliti akan lebih menekankan penggunaan variabel *cost and benefit* sebagai kesesuaian antara pembahasan dengan penggunaan teori, setelah itu peneliti juga akan menjelaskan bagaimana hambatan-hambatan RRT dalam menjalankan kepentingannya di Myanmar.

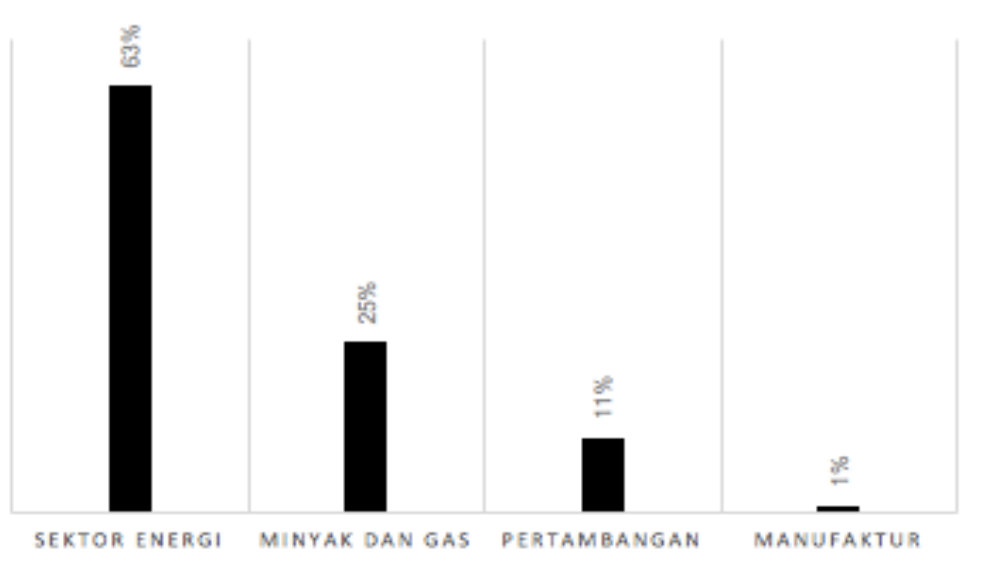
4.1 Contoh Kerjasama RRT-Myanmar dalam Bidang Ekonomi

Sebagai negara yang memiliki cadangan gas, minyak, serta memiliki bahan-bahan tambang yang cukup melimpah, hal ini membuat negara Myanmar sebagai salah satu negara dikawasan Asia Tenggara yang cukup dilirik oleh RRT. Dengan adanya keunggulan yang dimiliki negara Myanmar membuat RRT tertarik untuk melakukan kerjasama ekonomi antara keduanya. Terlebih, pada tahun 1988, pemerintah Myanmar telah mengeluarkan kebijakan liberalisasi perdagangan untuk menarik FDI sehingga RRT memanfaatkan momen tersebut untuk dapat menjalin kerjasama ekonomi (Gillan, 2009, pp. 36-37).

Dengan kondisi negara yang kaya akan sumber daya alamnya, kurangnya pesaing, serta lokasi Myanmar yang strategis untuk menjangkau wilayah Timur Tengah merupakan alasan mengapa RRT tertarik untuk menanam investasi langsung. Pada tahun 2009 silam. Berdasarkan pada data statistik dari kedutaan Myanmar, pada tahun 2011 investasi RRT di Myanmar tercatat sekitar 63% dalam sektor energi sementara itu, pada sektor-sektor lainnya seperti minyak dan gas tercatat sebesar 25%, pertambangan sebesar 11%, sedangkan manufaktur hanya menduduki angka 1%. Jika ditotalkan secara keseluruhan ketiga sektor tersebut mencapai angka 36%, lebih kecil dibandingkan dengan sektor energi yang

mencapai angka 63% (Dunn C. , 2016, pp. 5-7). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Diagram 4.1 Investasi RRT di Myanmar (2011)



Sumber : sumber di modifikasi dari (Dunn C. , 2016, p. 7)

Pada tahun 2012, RRT tercatat sebagai salah satu investor terbesar di Myanmar dan diikuti oleh negara-negara lain seperti Thailand, Hong Kong dan Korea Selatan. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Sumber FDI di Myanmar (2012)

Countries	Investment Capital (US\$ million)	Share of total FDI (%)
People's Republic of China	14,143	34,4
Thailand	9,568	23,3
Hong Kong	6,372	15,5
South Korea	2,959	7,2

Sumber : (Universe Logistics Group, 2016)

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa RRT adalah negara dengan FDI terbesar dan menduduki urutan pertama dengan total investasi sebesar US\$ 14.143 juta dan total FDI sebesar 34.4%. Sedangkan investor terbesar kedua diduduki oleh negara Thailand dengan total investasi US\$ 9.568 juta dengan total FDI sebesar 23.3% ditahun yang sama. Kemudian, kedudukan ketiga diikuti oleh Hong Kong dengan total investasi sebesar US\$ 6.372 juta dan total FDI sebesar 15.5%. Kedudukan keempat diisi oleh Korea Selatan dengan total investasi sebesar US\$ 2.959 juta dengan total FDI sebesar 7.2% (Universe Logistics Group , 2016).

Pada tahun 2013, RRT telah menanamkan investasi sebesar US\$ 14.1 miliar untuk menjalankan proyek-proyek yang ada di Myanmar, salah satu proyek terbesar RRT di Myanmar yakni bendungan Myitsone. RRT telah mendominasi penanaman modal asing dalam sektor energi seperti minyak, gas, listrik serta investasi pertambangan. Selain itu, sedikitnya kurang lebih 69 perusahaan dari RRT seperti China National Petroleum Corporation (CNPC), China Power Investment (CPI), China North Industries Corporation (NORINCO), dan Sinohydro Corporation telah terlibat dalam pembuatan pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga air, minyak, pertambangan, dan gas alam (IHLO, 2014).

RRT memanfaatkan posisinya sebagai investor utama di Myanmar untuk mendapatkan kepentingan strategis di wilayah Samudera Hindia. RRT juga mengambil saham sebesar 85% di pelabuhan Kyaukphyu yang merupakan pelabuhan utama Myanmar untuk dapat melancarkan jalannya proyek RRT. RRT memanfaatkan pelabuhan tersebut sebagai salah satu akses penting dalam investasi infrastruktur untuk memperdalam hubungan ekonomi RRT di seluruh wilayah Asia dan diluar Asia. RRT memanfaatkan pelabuhan Kyaukphyu sebagai pintu gerbang

dari pembangunan proyek pipa minyak dan gas yang nantinya akan terhubung hingga wilayah Kunming di RRT. Selain itu, untuk memperluas pengaruh geopolitik RRT ke wilayah Samudera Hindia maka dibutuhkan stabilitas kawasan negara Myanmar bagian Rakhine. RRT sejauh ini juga terkesan tidak ingin terlibat secara langsung dalam permasalahan Rohingya, karena tindakan ini bisa saja menjadi hambatan bagi RRT (The Irrawaddy, 2017).

4.2 Contoh Kerjasama RRT-Myanmar dalam Bidang Politik

Selain dalam bidang ekonomi, RRT-Myanmar juga mempunyai kerjasama dalam bidang politik, kerjasama ini sangat berkaitan dengan permasalahan etnis Rohingya di Myanmar. Myanmar melakukan negosiasi dengan RRT untuk cegah Draft Resolusi yang dikeluarkan melalui Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) terkait permasalahan Rohingya. DK PBB merupakan sebuah badan utama dalam PBB yang dibentuk pada tahun 1945 (United Nations Foundation , 2013). Dalam DK PBB ini terdapat lima anggota tetap dan sepuluh anggota tidak tetap. Adapun negara-negara yang termasuk kedalam anggota lima anggota tetap DK PBB yakni RRT, Perancis, Rusia, Britania Raya, dan Amerika Serikat. Setiap anggota memiliki satu suara, namun berbeda dengan lima anggota tetap, lima anggota tetap DK PBB memiliki hak veto. Hak veto merupakan sebuah suara negatif yang memungkinkan lima anggota tersebut dapat mencegah draft resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Pada umumnya, hak veto ini digunakan untuk melakukan kepentingan nasional negara anggota tetap untuk menegakkan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri mereka (Security Council Report, 2018).

Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dibawah mandat Pasal 6 dan pasal 8 Piagam PBB pada tahun 1945 telah menyebutkan bahwa PBB memiliki tanggung jawab untuk melindungi sebuah populasi dari kejahatan manusia di mana populasi tersebut berasal dari negara anggota PBB. Majelis Umum PBB menyatakan keprihatinannya atas insiden tersebut dengan mendesak pemerintah Myanmar untuk segera memberhentikan kekerasan yang terjadi pada etnis Rohingya. Majelis Umum PBB telah melakukan sebuah usaha untuk menyelesaikan permasalahan Rohingya dengan membahas draft resolusi melalui DK PBB (United Nations Human Rights Office of the High Commisioner , 2017). Dalam mengatasi permasalahan tersebut, Majelis Umum PBB mengeluarkan dua draft resolusi, yang *pertama* adalah nomor S/2007/14 pada tanggal 12 Januari 2007. Draft resolusi tersebut berisi mengenai desakan Majelis Umum PBB kepada pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan serangan militer terhadap warga sipil yang tinggal diwilayah pemukiman etnis minoritas. Khususnya untuk mengakhiri adanya pelanggaran hak-hak kemanusiaan terhadap etnis minoritas yang dilakukan oleh angkatan bersenjata. Draft tersebut juga menyebutkan bahwa pemerintah Myanmar harus mengizinkan organisasi kemanusiaan internasional untuk dapat beroperasi dalam mengatasi kebutuhan etnis minoritas tanpa ada hambatan apapun (United Nations Security Council , 2007). Draft resolusi yang *kedua* yakni, Dewan HAM PBB dalam membuat tim pencari fakta atas konflik Rakhine pada tanggal 26 Maret 2017. Adapun guna dari tim pencari fakta ini adalah untuk mencari mengenai fakta-fakta pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine. Ketika fakta-fakta pelanggaran HAM tersebut ditemukan maka tim pencari fakta

ini menjamin adanya pertanggungjawaban dari pelaku serta menjamin adanya keadilan bagi korban konflik (United Nations Human Rights Council , 2018).

Myanmar mengandalkan posisi RRT sebagai anggota tetap DK PBB dan pemegang hak veto untuk menggagalkan draft resolusi yang dibahas oleh Majelis Umum PBB mengenai krisis Rohingya (Asia News , 2017). Hingga pada akhirnya, RRT menggunakan hak vetonya untuk mencegah draft resolusi yang dibahas Majelis Umum PBB untuk Myanmar dengan alasan demi stabilitas kawasan Myanmar. Namun, seperti yang sudah dijelaskan bahwa pada umumnya lima anggota tetap DK PBB menggunakan hak vetonya untuk kepentingannya sendiri, sehingga RRT disinyalir memiliki kepentingan dalam menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan draft resolusi terhadap Myanmar. Motif RRT dalam menggagalkan draft resolusi ke Myanmar tidak lain adalah untuk memperluas pengaruhnya di Myanmar, tindakan ini sekaligus bertujuan untuk membatasi pengaruh AS yang menyebar di negara-negara Asia. Sehingga, dengan melindungi Myanmar dari draft resolusi Majelis Umum PBB, RRT mendapatkan keuntungan tersendiri dalam mempertahankan pengaruhnya pada negara-negara tetangga dengan cara membatasi pengaruh AS yang telah menyebar (Balachandran, 2017).

4.3 RRT Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya

Jika melihat kembali asal usul Rohingya dapat diketahui bahwa etnis Rohingya telah lama tinggal selama berabad-abad di Myanmar bahkan sebelum kemerdekaan Myanmar. Namun, keberadaan mereka justru tidak tercatat sebagai etnis lokal di Myanmar. Penderitaan yang dirasakan Rohingya tidak hanya datang dari penduduk setempat, sikap pemerintah Myanmar juga berlaku demikian. Pemerintah

Myanmar justru melegalkan tindakan yang dilakukan secara diskriminatif kepada etnis Rohingya (Amnesty International UK, 2017). Seperti yang telah dijelaskan oleh peneliti pada dua yakni mengenai kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingnya terdapat beberapa kebijakan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Kebijakan tersebut diantaranya adalah kebijakan penolakan kewarganegaraan, kebijakan pembatasan hak sosial yang meliputi pembatasan kebebasan untuk bepergian, pembatasan hak untuk menikah dan berkeluarga, serta pembatasan hak untuk beribadah. Selain itu, kebijakan lain yang diberlakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya yakni kebijakan pembatasan akses pendidikan dan kesehatan dan yang terakhir kebijakan pengusiran.

Melihat dari kebijakan pemerintah Myanmar yang bersifat diskriminatif ini tentu mendapatkan banyak pertentangan dari dunia internasional. Bahkan PBB sangat menyayangkan atas tindakan yang diberikan pemerintah Myanmar untuk Rohingya, PBB menginginkan bahwa tindakan tersebut dapat segera dihentikan (Deutsche Welle , 2018). Namun, RRT memiliki sikap yang berbeda dari negara-negara lainnya, RRT justru mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Geng Shuang sebagai juru bicara Kementrian Luar Negeri RRT yang menyatakan bahwa:

“We support Myanmar’s efforts in upholding peace and stability in Rakhine state. We hope order and the normal life there will be recovered as soon as possible” (The Straitstimes, 2017).

Kemudian, Geng Shuang menambahkan bahwa, melalui kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Myanmar untuk menjaga stabilitas negaranya (The Straitstimes, 2017).

Hong Liang, sebagai duta besar RRT ke Myanmar juga menyampaikan pesan dukungannya terhadap pemerintah Myanmar bahwa sikap yang dilakukan oleh RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya merupakan hal yang cukup jelas. Permasalahan Rohingya merupakan permasalahan internal negara Myanmar, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut RRT tidak mempermasalahkan langkah yang telah diambil oleh pemerintah Myanmar, sehingga RRT pun mendukung hal tersebut demi menjaga keamanan negara Myanmar itu sendiri (The Global New Light of Myanmar , 2017). Adapun upaya yang diberikan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya yaitu dengan membentengi Myanmar dari sanksi PBB seperti yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya terkait RRT memveto draft resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB terhadap Myanmar. Upaya tersebut dilakukan agar kepercayaan Myanmar terhadap RRT tetap terjaga.

4.4 Kepentingan Ekonomi RRT di Myanmar

Motif RRT terhadap Myanmar dil balik konflik Rohingya ini sangat terlihat ketika RRT mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Disaat dunia internasional mengecam kebijakan pemerintah Myanmar yang menjurus pada pemusnahan massal tersebut hal yang berbeda ditunjukkan oleh RRT. RRT justru mendukung atas kebijakan tersebut dengan alasan demi menjaga stabilitas kawasan negara Myanmar. Dalam melancarkan proses kepentingannya di Myanmar, RRT membutuhkan kondisi negara Myanmar yang stabil agar kepentingan-kepentingannya di Myanmar tetap berjalan dengan lancar. Dengan adanya konflik Rohingya, membuat kondisi negara Myanmar tidak stabil. Konflik Rohingya

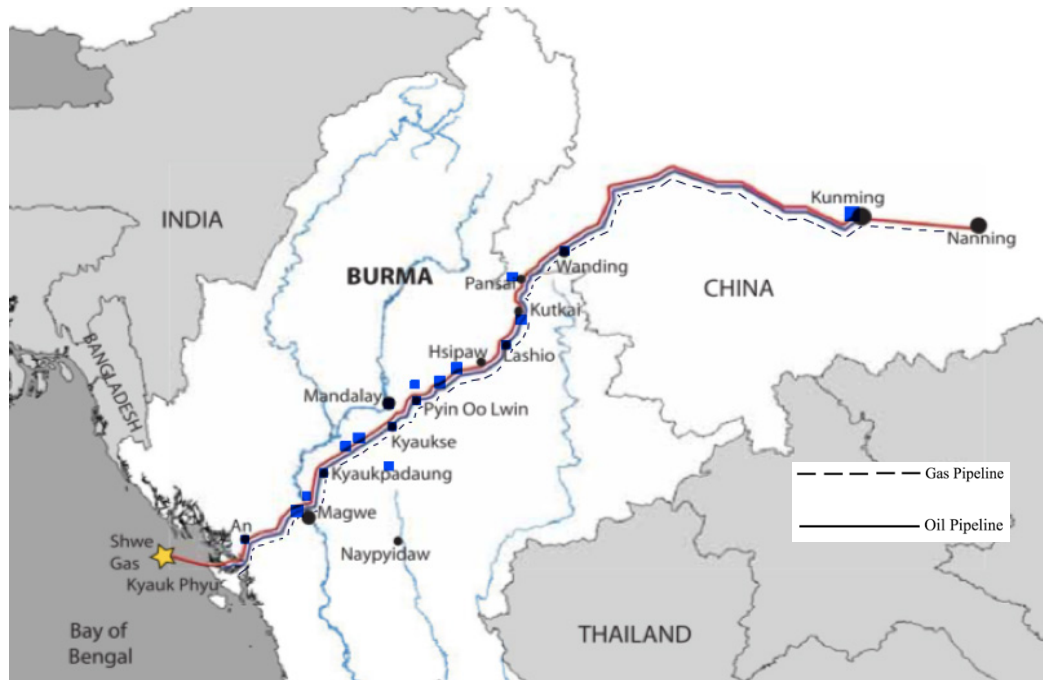
menjadi hambatan tersendiri bagi RRT dalam menjalankan kepentingannya. Sehingga, dengan mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya, RRT bertujuan untuk melancarkan proyek pembangunan pipa minyak dan gas sebagai kepentingan utama ekonomi RRT di wilayah Rakhine.

4.4.1 Proyek Pipa Minyak dan Gas

Kerjasama bilateral antara RRT dan Myanmar berhasil dijalin melalui pembangunan jalur pipa minyak dan gas yang disepakati oleh perusahaan Cina National Petroleum Corporation (CNPC) dengan perusahaan minyak Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE). Kerjasama ini disepakati pada tahun 2009 dengan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pembangunan proyek jalur pipa minyak dan gas yang direncanakan akan dibangun dari pelabuhan Kyaukphyu. Pipa ini dirancang untuk dapat mengangkut sebanyak 22 juta ton minyak pertahunnya. Total investasi yang ditanamkan oleh RRT dalam proyek jalur pipa minyak dan gas ini menghabiskan dana sebesar US\$ 2,45 miliar (Shin, 2017).

Kontrak kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara ini akan berjalan selama 30 tahun. CNPC sebagai perusahaan dari RRT memegang saham sebesar 51% sementara MOGE perusahaan Myanmar hanya memegang sebesar 49%. Sehingga proyek ini didominasi oleh perusahaan RRT. Adapun rencana pembangunan pipa gas dan minyak dimulai dari pelabuhan Kyaukphyu, Myanmar menuju wilayah Kunming di RRT dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1 Jalur Pipa Minyak dari Myanmar ke RRT



Sumber : (Srinivas, 2014, p. 593)

RRT memiliki tujuan tersendiri dalam membangun pipa gas dan minyak, diantaranya yaitu untuk menghemat biaya dan waktu dalam pengiriman minyak mentah tersebut. Sebelumnya pengiriman minyak mentah harus melewati jalur laut perairan Indonesia. Pembangunan ini tentunya berdampak pada perubahan rute pengiriman untuk menghindari kemacetan yang sering terjadi di Selat Malaka. Jauhnya rute pengiriman membuat RRT harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk transportasinya. Sehingga dengan dibuatnya jalur pipa gas dan minyak ini cukup menghemat biaya pengeluaran dalam pengiriman minyak mentah dengan memotong wilayah Myanmar menuju RRT dengan melewati daerah-daerah seperti Mandalay dan Naypyidaw seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2 Jalur Pelayaran RRT



Sumber: (Corridor of Power : China's Trans-Burma Oil and Gas Pipelines ,
2009, p. 9)

Keuntungan yang didapat dari Jalur pipa minyak dan gas ini akan berdampak pada peningkatan ekonomi lokal di Propinsi Yunnan. Dengan adanya pembangunan pipa tersebut membuat pengiriman pasokan minyak menjadi lebih cepat dan murah karena dikirim langsung ke wilayah Kunming. Sebelumnya pasokan minyak ini tergolong sangat terbatas dan membutuhkan biaya pengiriman yang cukup mahal (Mitchell, 2012, pp. 48-49). Oleh karena itu pembangunan pipa ini memberikan dampak yang positif bagi kelangsungan ekonomi RRT. Dari kerjasama proyek pembangunan ini, negara Myanmar memiliki posisi yang cukup penting sebagai jembatan yang menghubungkan masuknya pasokan energi minyak dan gas ke RRT

terutama pada wilayah Rakhine. Rakhine merupakan wilayah sebagai pintu masuk jalur pipa tersebut dari lautan Hindia karena letaknya yang langsung berhadapan dengan lautan Hindia. Untuk itu, pemerintah Myanmar harus menjamin bahwa wilayah Rakhine merupakan wilayah yang aman demi kelancaran proses pembangunan proyek tersebut. Selanjutnya, selain kepentingan jalur pipa minyak dan gas sebagai kepentingan utama RRT juga memiliki kepentingan lain seperti pertambangan dan pembangkit listrik tenaga air.

4.5 Kepentingan Politik RRT di Myanmar

RRT merupakan sekutu Myanmar dan memiliki pengaruh yang besar terhadap Myanmar. Sebagai negara yang bersekutu, RRT tidak memberikan atau melakukan tindakan perlawanan terhadap pemerintah Myanmar dalam isu Rohingya. RRT hanya memberikan dukungan yang positif atas tindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya tanpa terlibat langsung dalam permasalahan Rohingya maupun terlibat langsung dalam membuat kebijakan tersebut. Dunia internasional menganggap bahwa RRT telah mengabaikan krisis Rohingya yang terjadi di wilayah Rakhine dan sikap yang ditunjukkan oleh RRT semata-mata dilakukan demi melindungi kebijakan-kebijakan kerjasama RRT di Myanmar.

Hal berbeda ditunjukkan oleh negara *super power* yakni AS. Sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip dalam HAM, AS sangat mengkhawatirkan adanya tindakan diskriminasi yang terjadi pada etnis minoritas di Myanmar. Tidak hanya itu AS juga menuntut bahwa kekerasan tersebut harus segera dihentikan. Kecaman AS terhadap krisis Rohingya di Rakhine ini didukung

dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson yang menyatakan bahwa kekerasan yang terjadi pada warga Rohingya di Rakhine harus segera dihentikan, apalagi kekerasan tersebut menyebabkan isu *ethnic cleansing* (South China Morning Post, 2017).

AS telah mengambil sikap dan berpihak pada Rohingya, namun disisi lain AS juga khawatir dampak yang akan terjadi terhadap bisnis AS di Myanmar apabila AS terlalu mendesak Myanmar dan terlalu mencampuri permasalahan negara lain. Adapun dampak yang dikhawatirkan oleh AS yaitu kehilangan kontrak bisnis, investasi, dan peluang pasar di Myanmar. Selain itu, pengaruh AS dikhawatirkan akan berkurang, sehingga perusahaan-perusahaan dari RRT dapat memanfaatkan peluang dalam penurunan dari pengaruh AS di Myanmar (Corr, 2016).

Menurunnya pengaruh AS di Myanmar dapat membuat pengaruh RRT di Myanmar semakin besar. Terlebih sikap RRT untuk tidak ikut campur dalam krisis Rohingya. RRT terlalu mendedikasikan dirinya untuk menjadi hegemoni global dengan cara RRT banyak melakukan kesepakatan perdagangan bilateral dengan negara-negara lain. Kemudian RRT juga berusaha untuk mencari sebuah kawasan yang memiliki potensi ekonomi tinggi dan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian RRT dalam jangka waktu yang panjang. Salah satunya yaitu negara Myanmar yang memiliki cadangan energi yang dibutuhkan oleh RRT contohnya gas alam (Zhao, 2011, p. 92). Sikap RRT yang tidak terlibat sedikitpun dalam krisis Rohingya disinyalir untuk dapat mendominasi pengaruh di negara Myanmar. Maka secara tidak langsung, apabila RRT dapat mendominasi

pengaruh di Myanmar maka akan sangat mudah bagi RRT untuk dapat menguasai sumber energi yang ada di Myanmar.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kepentingan politik RRT di Myanmar, dapat dibuktikan dengan sikap RRT dengan tidak ikut campur terhadap krisis Rohingya dikarenakan RRT sangat yakin bahwa Myanmar dapat menyelesaikan konflik internal negaranya tanpa harus ada ikut campur dari negara lain. Selain itu, RRT beranggapan bahwa campur tangan negara lain dalam menangani krisis Rohingya di Myanmar tidak akan dapat terselesaikan. Dengan adanya campur tangan negara lain hanya akan memperumit permasalahan tersebut sehingga sulit untuk dapat menyelesaikan permasalahan Rohingya (Coghill, 2017). Dalam menjalin hubungan baik dengan negara lain, RRT memiliki prinsip untuk tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain karena hal itu hanya akan merusak hubungan kerjasama yang telah dijalin. Sikap itulah yang diberikan RRT dalam menanggapi krisis Rohingya di Myanmar. Seperti yang telah diutarakan oleh Guo Yezhou sebagai Wakil Menteri Departemen Internasional Komite Sentral Communist Party of China (CPC) yang mengatakan bahwa berdasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya, keterlibatan sebuah negara lain terhadap permasalahan domestic sebuah negara hanya akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari negara tersebut, sehingga RRT tidak ingin melakukan hal tersebut (CGTN , 2017). Alasan lain juga diungkapkan Guo Yezhou yang mengatakan bahwa ketidak terlibatan RRT dalam krisis Rohingya karena RRT tidak menginginkan ketidakstabilan Myanmar dapat memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap negaranya. Sehingga RRT hanya mendukung segala upaya yang dilakukan oleh Myanmar untuk menjaga kestabilan kawasannya (Dawn,

2017). Bagi RRT, krisis Rohingya bukanlah sebuah hambatan untuk dapat mencapai kepentingan negaranya, terlebih dalam kepentingan politik.

RRT merupakan salah satu negara besar yang cukup diperhitungkan di dunia internasional. Terutama dalam posisi kekuatan politik antara RRT dan AS yang menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Dominasi RRT di Myanmar dapat dilihat dari permasalahan Rohingya, di mana negara AS mendesak dan mengecam perlakuan Myanmar terhadap Rohingya, sedangkan RRT justru bersikap sebaiknya. RRT menawarkan dukungan ekonomi dan politik dan menjalin hubungan baik terlepas dari permasalahan Hak Asasi Manusia yang mengganggu hubungan Myanmar dengan negara lainnya. Ditengah konflik Rohingya ini, pengaruh AS di Myanmar sangat berkurang sementara RRT dapat membuat Myanmar lebih condong ke RRT dan mulai meninggalkan AS (Pennington, 2017). Sehingga, menurunnya pengaruh AS merupakan sebuah peluang bagi RRT untuk dapat mendominasi pengaruhnya secara politik di Myanmar. Selain dominasi pengaruh RRT di Myanmar, Myanmar juga bergantung dengan RRT dalam bidang ekonomi. Contohnya, Myanmar mendapatkan bantuan rendah bunga sebesar US\$ 200 juta dari RRT yang akan digunakan untuk membeli alat dan mesin pertanian. Namun, dibalik bantuan tersebut RRT meminta hak-hak istimewa bagi perusahaan-perusahaan RRT yang berdiri di Myanmar (Linter, 2018).

RRT tidak hanya giat mendekati dirinya kepada Myanmar saja, dapat kita lihat bahwa RRT juga semakin giat dalam mendekati dirinya dengan Asia Tenggara. Dimulai dari hubungan politik yang fundamental sampai mengarah menjadi RRT sebagai pusat kekuatan ekonomi di Asia. Pertumbuhan ekonomi

RRT pada saat ini memang sangat menggiurkan. Oleh karena itu, tidak heran jika hampir semua negara-negara di Asia Tenggara memiliki hubungan ekonomi dengan RRT khususnya dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Hubungan ekonomi antara RRT dan Asia Tenggara merupakan hal yang sangat penting bagi RRT karena RRT membutuhkan jaminan bagi keberlangsungan sumber daya alam untuk kepentingan nasionalnya (Ah, 2017, p. 1). RRT berharap bahwa pada suatu saat negara-negara di Asia dapat berpihak pada RRT sebagai ‘pemimpin’ ketika terjadi sebuah konflik yang mengancam kawasan Asia. Untuk itu, RRT mengajak negara-negara ASEAN untuk dapat melakukan latihan militer bersama dengan kelompok regional Asia Tenggara yang bertempat di Laut China Selatan. Upaya yang dilakukan RRT disinyalir bahwa RRT sangat ingin dipandang sebagai ‘pemimpin’ dan ingin menggantikan peran AS dalam pengaturan keamanan kawasan (Nagai, 2018).

Selanjutnya, kepentingan lain RRT dalam bidang politik yaitu RRT mencari dukungan Myanmar untuk mendukung posisi RRT dalam isu Laut China Selatan dalam forum regional ASEAN. Dalam kasus Laut China Selatan, negara-negara ASEAN memiliki perselisihan wilayah utama dengan Laut China Selatan. Untuk itu, diadakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN tahun 2014 di Myanmar merupakan harapan bagi RRT agar Myanmar sebagai tuan rumah tidak turut mempermasalahkan posisi RRT dalam permasalahan tersebut. Seperti yang telah dilakukan RRT terhadap isu Rohingya di Myanmar di mana RRT tidak mempermasalahkan bahkan mendukung segala upaya yang dilakukan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Sehingga RRT juga

berharap Myanmar dapat memberikan dukungannya di KTT ASEAN (Sun, 2012, p. 82).

Harapan RRT dalam mencari dukungan Myanmar untuk mendukung posisinya dalam isu Laut China Selatan pada KTT ASEAN 2014 dinyatakan langsung kepada pejabat Myanmar sebelum forum regional ASEAN yang diselenggarakan di Bali pada tahun 2011. Myanmar merespon dengan baik dalam KTT ASEAN 2014 terkait harapan RRT dalam isu Laut China Selatan. Hal ini dibuktikan dengan sifat netral yang dibawa oleh Myanmar berdasarkan pada pertimbangan *geoeconomic* dan *geopolitic*. Selain itu, Myanmar juga akan mengusahakan mengenai solusi yang mudah diterima semua negara terkait permasalahan tersebut. Myanmar akan mencoba untuk mencapai kesepakatan tentang kode etik dalam menyelesaikan sengketa Laut China Selatan sebagai tindakan pertamanya (Latt, 2013).

Selain itu, Myanmar juga berusaha mengatasi permasalahan tersebut melalui keterlibatan dan jalur negosiasi. Myanmar juga melihat bahwa RRT memiliki peran penting untuk pengembangan negara-negara ASEAN. Dengan menerapkan dan mempromosikan perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk antara ASEAN dan RRT berupa membangun infrastruktur investasi Bank Asia dan mempromosikan kerjasama keuangan. RRT juga mendukung adanya pertumbuhan dan keterlibatan ASEAN dalam kerjasama regional. Sehingga, Myanmar tidak menginginkan perselisihan yang terjadi antara negara-negara ASEAN dengan RRT akibat sengketa tersebut. Untuk itulah mengapa Myanmar tidak bersikap menentang RRT dalam forum regional KTT ASEAN yang dilaksanakan di Myanmar pada tahun 2014 (Shihong, 2015).

4.6 Analisis Pendekatan Rational Choice Theory (RCT)

Pada sub-bab terakhir peneliti akan menganalisis dengan menggunakan Rational Choice Theory (RCT) atau Teori Pilihan Rasional untuk melihat mengapa kepentingan RRT dianggap mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya melalui dua variabel yang saling berkaitan yaitu *cost and benefit* serta hambatan-hambatan RRT dalam menjalankan kepentingannya.

4.6.1 Cost

Dalam mengambil sebuah keputusan maupun kebijakan, tindakan yang dilakukan oleh *rational actions* ini harus berdasarkan pada *cost* sebagai sebuah pertimbangan. Penerapan konsep *cost* ini berguna untuk dapat mengetahui lebih dalam terkait seberapa besar konsekuensi atau kerugian yang mungkin saja terjadi ketika melakukan sebuah pertimbangan. Untuk meminimalisir terjadinya resiko kerugian, *rational actions* biasanya membuat beberapa rencana dalam sebuah keputusan. Misalnya plan A dan plan B. Pada masing-masing rencana tersebut tentu memiliki resiko kerugian masing-masing. Namun, *rational action* biasanya lebih memilih rencana mana yang paling minim terjadinya resiko. Pada akhirnya *rational action* memilih salah satu dari plan tersebut sebagai tindakan yang paling minim resiko untuk dapat memperbesar sebuah keuntungan (Dompere, 2004, p. 132).

Seperti yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya bahwa, RRT memiliki kepentingan ekonomi dan politik di Myanmar. Perlu mengingat kembali bahwa dalam bidang ekonomi, RRT memiliki kepentingan berupa proyek pembangunan pipa minyak dan gas di wilayah Rakhine. Proyek pembangunan pipa minyak dan gas ini salah satu kepentingan utama RRT di Myanmar dalam bidang ekonomi. Proyek ini juga disebut-sebut sebagai kepentingan ambisius dan

memakan dana hingga triliunan untuk menjalankan proyek tersebut. Selain itu, kepentingan RRT dalam bidang politik di Myanmar adalah mengambil alih dan mendominasi pengaruh di Myanmar yang sebelumnya di dominasi oleh AS. Kemudian, RRT juga mencari dukungan Myanmar untuk mendukung posisi RRT dalam isu Laut China Selatan di ASEAN dalam forum regional yaitu KTT ASEAN yang diselenggarakan di Myanmar pada tahun 2014 silam. RRT berharap bahwa Myanmar sebagai tuan rumah tidak mempermasalahkan posisi RRT dalam sengketa tersebut dan mencari solusi lain disertai dengan persetujuan negara-negara ASEAN lainnya. Untuk mencapai kepentingan-kepentingan tersebut RRT tentu saja memiliki strategi-strategi tersendiri dalam melakukan pendekatan dengan hubungan luar negeri.

Strategi RRT yang *pertama* dalam mengincar kepentingan nasionalnya di Myanmar yaitu melalui momen pemilu Myanmar pada tahun 2010. Menurunnya pengaruh RRT di Myanmar dibuktikan dengan adanya pemilu pertama Myanmar yang dilaksanakan pada tahun 2010. Tidak hanya penurunan dominasi yang mulai dimasuki oleh AS, pemilu tersebut juga berdampak pada hubungan kedua negara. Pada akhirnya RRT membuat strategi untuk memperkuat hubungan ekonomi dan politik. Konsolidasi hubungan ini dilakukan RRT dengan cara meningkatkan kunjungan-kunjungan antar pemimpin negara untuk membahas mengenai investasi, perdagangan, dan peminjaman oleh kedua negara. Akan tetapi konsolidasi yang dilakukan oleh RRT ini terhambat karena keterbatasan pengaruhnya di Myanmar. Selain itu, kemunculan oposisi yang berpendapat bahwa RRT hanya ingin mengeksploitasi SDA di Myanmar yang dilakukan oleh perusahaan RRT. Sehingga, strategi ini dikhawatirkan hanya akan membuat ketegangan hubungan

antara kedua negara yang akibatnya akan berdampak ke perusahaan-perusahaan RRT yang telah berdiri di Myanmar. Terlebih RRT bertindak lebih agresif ketika pemilu 2010 dan kemunculan oposisi yang membuat sentimen anti RRT (International Crisis Group, 2010).

Kedua, RRT mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis di sub-bab sebelumnya bahwa dukungan RRT terhadap kebijakan pemerintah Myanmar telah diutarakan oleh Geng Shuang sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT. Tidak hanya itu, dukungan yang diberikan secara lisan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT juga dibuktikan dengan adanya upaya yang dilakukan oleh RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar. Adapun upaya yang dilakukan oleh RRT adalah dengan membentengi Myanmar dari sanksi PBB yang diakibatkan oleh kebijakannya sendiri. Dalam strategi ini, RRT hanya mendapatkan kritikan secara tidak langsung dari AS. AS memberikan kritikan terhadap RRT karena dianggap telah melindungi Myanmar dari kecaman Majelis Umum PBB terkait tindakan militer Myanmar (Nichols, 2018).

Jadi, jika melihat dari kedua strategi tersebut di mana pada strategi pertama, RRT mendapatkan *cost* atau konsekuensi berupa kerenggangan hubungan RRT-Myanmar yang kemungkinan saja akan berdampak pada perusahaan-perusahaan RRT yang telah berdiri di Myanmar. Kemudian munculnya oposisi menyebabkan munculnya sentimen anti RRT di Myanmar. Pada strategi yang kedua yakni dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar, RRT hanya mendapatkan *cost* berupa kritikan yang dinyatakan secara tidak langsung oleh AS. Sebagai pertimbangan RRT lebih memilih strategi yang kedua yaitu dengan mendukung kebijakan

pemerintah Myanmar terhadap Rohingya karena dianggap lebih minim resiko dibandingkan strategi yang pertama.

4.6.2 Benefit

Berangkat dari strategi RRT dalam mencapai kepentingan-kepentingannya di Myanmar membuat RRT memilih strategi untuk mendukung kebijakan pemerintah Myanmar sebagai salah satu strategi yang dianggap paling minim resiko namun dapat memaksimalkan keuntungan. Mengingat kembali bahwa kepentingan utama RRT dibidang ekonomi adalah proyek pembangunan pipa minyak dan gas. Sedangkan kepentingan utama dalam bidang politik yaitu RRT berusaha untuk mengambil alih dan mendominasi pengaruh di Myanmar. Ketika pengaruh RRT di Myanmar lebih mendominasi maka akan sangat mudah bagi RRT untuk mendapatkan kepentingannya. Dengan adanya kepentingan dalam bidang ekonomi dan politik yang kemudian membuat RRT memilih untuk menerapkan strategi mendukung kebijakan pemerintah Myanmar walaupun mendapatkan kritikan secara tidak langsung oleh AS. Namun, dengan mendukung kebijakan tersebut dapat membuktikan bahwa RRT dapat meraih kepentingan-kepentingannya di Myanmar.

Benefit yang didapatkan oleh RRT dalam bidang ekonomi dapat dibuktikan dengan adanya MoU untuk membangun proyek jalur pipa minyak dan gas yang telah disepakati oleh kedua negara. Dalam bidang politik, *benefit* yang dirasakan oleh RRT sejauh ini adalah dominasi pengaruh RRT di Myanmar karena RRT mendukung kebijakan pemerintah Myanmar. Sedangkan AS memilih untuk pro terhadap Rohingya, karena alasan itulah yang membuat Myanmar berpaling dari AS dan lebih mengeratkan hubungan dengan RRT. Selain itu, Myanmar

mendukung posisi RRT dalam sengketa Laut China Selatan pada forum regional KTT ASEAN tahun 2014 yang diselenggarakan di Myanmar. Jadi, sejauh ini jika dilihat dari *benefit* yang didapatkan oleh RRT yang membuat RRT lebih memilih untuk tidak ikut campur urusan internal negara Myanmar dan mendukung segala tindakan pemerintah Myanmar untuk menjaga stabilitas negaranya. Atas dasar kepentingan-kepentingan tersebutlah yang menjadi dorongan bagi RRT untuk mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya.

4.6.3 Hambatan RRT Dalam Menjalankan Proyeknya di Myanmar

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat dua hambatan utama dalam penerapan RCT yaitu sumber daya alam dan institusi sosial. **Pertama**, sumber daya alam dapat diartikan bahwa aktor yang membutuhkan lebih dari satu sumber daya yang berbeda, maka aktor tersebut juga membutuhkan biaya yang lebih untuk dapat membuat akses sumber daya yang berbeda. Sehingga aktor biasanya akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk itu. **Kedua**, hambatan dari institusi sosial yang memiliki prinsip positif maupun negatif sehingga dapat mendorong bahkan mencegah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor. Untuk itu peneliti akan mencoba untuk mengaitkan konsep dua hambatan utama dalam RCT kedalam hambatan-hambatan yang dimiliki oleh RRT dalam menjalankan proyeknya di Myanmar. RRT memiliki enam hambatan utama dalam menjalankan proyek-proyeknya, terutama ketika pemerintah Myanmar mengalami masa transisi politik dari Junta militer menjadi lebih demokratis. Transisi politik tersebut tentu saja akan berpengaruh pada kebijakan ekonomi maupun politik Myanmar yang nantinya akan menimbulkan resiko kepada RRT.

1. Dalam membangun pipa minyak dan gas RRT menanggung biaya yang cukup banyak. Biaya dalam membangun pipa minyak dan gas tersebut diperkirakan sebesar US\$ 5 miliar. Tidak hanya itu, pembangunan jalur pipa minyak tersebut menembus medan yang beragam seperti menembus daerah pegunungan yang melintang, melewati hutan-hutan, serta sungai dengan gelombang air yang sangat tinggi. Belum lagi rute pipa minyak dan gas tersebut melewati daerah konflik bersenjata, sehingga RRT khawatir atas keamanan pembangunan proyek ambisiusnya
2. Pembangunan proyek pipa minyak dan gas menyebabkan kerusakan lingkungan seperti erosi tanah dan penggundulan hutan (deforestasi). Akibatnya banyak aksi protes yang dilakukan warga setempat karena dianggap hanya merugikan masyarakat setempat. Aksi protes tersebut juga menghambat jalannya pembangunan pipa minyak dan gas (Zhao, 2011, p. 92).
3. Apabila perusahaan RRT mengeksploitasi sumber daya alam di Myanmar secara berlebihan dengan tidak mempertimbangkan kerusakan lingkungan maka badan pengawas pembangunan tersebut akan meminta pemerintah Myanmar untuk menutup proyek tersebut. Akibatnya RRT harus mematuhi aturan Undang-Undang yang berlaku dan membayar lebih untuk melakukan perlindungan lingkungan (Isnarti, 2017, p. 200).
4. RRT dituntut untuk memperhatikan kondisi sosial dan masalah sosial yang diakibatkan dari pembangunan pipa tersebut dengan membayar kompensasi kerugian-kerugian yang diterima oleh masyarakat setempat.

5. Selain itu, hambatan RRT dalam menjalankan kepentingannya di Myanmar bisa saja datang dari negara luar. Misalnya persaingan dengan negara India untuk memperebutkan cadangan sumber daya energi yang dimiliki oleh Myanmar (Isnarti, 2017, pp. 202-204).
6. Karena berbagai budaya dan gaya hidup masyarakat Myanmar yang berbeda-beda membuat perusahaan RRT sulit untuk dapat menemukan pekerja lokal dari Myanmar yang memiliki kualitas yang baik dalam bekerja. Oleh karena itu, kesempatan bekerja di perusahaan RRT bagi masyarakat Myanmar sangat terbatas. Sehingga perusahaan-perusahaan RRT di Myanmar dianggap gagal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat setempat (Sherpa, 2016, p. 67).

Jika hambatan-hambatan yang didapatkan RRT dalam menjalankan proyeknya dikaitkan dengan dua hambatan utama dalam RCT maka dapat disimpulkan bahwa pada poin sumber daya alam RRT harus mengeluarkan biaya lebih akibat dari proyek pembangun tersebut. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan poin 1, 3, dan 4 yang mengatakan bahwa RRT harus mengeluarkan biaya sekitar US\$ 5 miliar untuk biaya pembangunan proyek tersebut ditambah dengan kondisi akses yang sulit untuk dijangkau. RRT juga harus membayar lebih untuk biaya perlindungan lingkungan, dan membayar kompensasi kerugian-kerugian yang diterima oleh masyarakat Myanmar sebagai bentuk pertanggung jawaban. Kemudian pada poin hambatan yang kedua dalam RCT yaitu terdapat institusi sosial yang dapat mendorong atau mencegah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor. Pernyataan tersebut sesuai pada poin ke 5, di mana pada poin tersebut menyebutkan bahwa RRT khawatir akan adanya hambatan yang datang dari negara

luar. Salah satu contohnya adalah negara India. Mengingat India juga merupakan negara yang membutuhkan sumber daya energi untuk dapat memenuhi kebutuhan negaranya, terlebih lokasi negara India dan Myanmar yang berdekatan. Sehingga RRT-India saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya energi di Myanmar. Adanya kebijakan terkait kepentingan energi Myanmar dan kepentingan nasional RRT-India justru menyebabkan ketegangan diantara kedua negara tersebut. Sehingga RRT menganggap bahwa India merupakan salah satu ancaman untuk saling memperebutkan Myanmar, dan dapat menghambat kepentingan RRT di Myanmar (Panwar, 2009, pp. 1-2). Berikut poin-poin penjelasan variabel teori sebagai hasil dari penelitian:

Tabel 4.2 Klasifikasi Variabel RCT terhadap pembahasan

Variabel	Deskripsi
<i>Cost</i>	1. RRT mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Strategi ini dianggap lebih minim resiko dan dapat memaksimalkan keuntungan bagi RRT.
<i>Benefit</i>	2. Ekonomi : a. Jalur pipa minyak dan gas. Jalur ini memberikan keuntungan bagi RRT dalam menghemat biaya dan waktu pengiriman minyak mentah. Selain itu, benefit

	<p>yang dirasakan yaitu RRT dapat meningkatkan perekonomiannya di propinsi Yunnan.</p> <p>Politik :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dominasi pengaruh kekuasaan di Myanmar. b. Dukungan Myanmar terhadap RRT dalam forum KTT ASEAN tahun 2014 di Myanmar terkait sengketa Laut China Selatan.
<p>Hambatan-hambatan RRT</p> <p>Dalam Menjalankan Proyek Pipa Minyak dan gas</p>	<p>3. A. Pembengkakan biaya.</p> <p>Selain mengeluarkan biaya sebesar US\$ 5 miliar untuk proyek jalur pipa minyak dan gas tersebut, RRT juga harus membayar lebih untuk melalukan perlindungan lingkungan sebagai salah satu bentuk tanggung jawabnya di Myanmar. Selain itu, RRT di tuntut untuk membayar kompensasi kerugian-kerugian yang dirasakan oleh masyarakat setempat.</p> <p>B. RRT-India saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya energi yang ada di Myanmar, kemunculan India dianggap dapat menghambat ruang gerak RRT dalam menjalankan proyeknya.</p>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah Myanmar Terhadap Rohingya Periode 2012-2017”, secara garis besar membahas tentang kebijakan diskriminasi pemerintah Myanmar yang ditujukan pada etnis minoritas di Myanmar yaitu Rohingya. Kebijakan diskriminasi ini ditujukan untuk menghilangkan etnis Rohingya dari negara Myanmar yang disebabkan karena etnis Rohingya tidak termasuk kedalam daftar etnis resmi di Myanmar, sehingga Rohingya dianggap sebagai etnis illegal. Adapun kebijakan diskriminatif yang diberlakukan oleh pemerintah Myanmar diantaranya adalah: kebijakan penolakan kewarganegaraan, kebijakan pembatasan hak sosial yang meliputi pembatasan kebebasan untuk bepergian, pembatasan hak untuk menikah dan berkeluarga, dan pembatasan hak untuk beribadah. Selain itu, pemerintah Myanmar juga memberlakukan kebijakan pembatasan akses pendidikan, kesehatan, dan kebijakan pengusiran yang mengarah pada genosida hingga menyebabkan isu *ethnic cleansing*.

Kebijakan diskriminasi yang diberlakukan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya ini menyebabkan kecaman-kecaman dari dunia internasional. Salah satunya kecaman yang datang dari Majelis Umum PBB yaitu dengan mengeluarkan draft resolusi untuk segera menghentikan tindakan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Namun, berbeda halnya dengan RRT. Sebagai salah satu negara yang memiliki hubungan cukup erat dengan Myanmar membuat RRT tidak

mempermasalahkan kebijakan tersebut untuk diterapkan dengan alasan demi menjaga stabilitas kawasan negara Myanmar itu sendiri.

Terlepas dari kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya, RRT sendiri dalam Kebijakan Luar Negerinya di bidang ekonomi pada umumnya menerapkan kebijakan One Belt One Road (OBOR). Kebijakan OBOR ditujukan untuk dapat menghubungkan daerah perbatasan RRT dengan negara-negara tetangga. Kebijakan itu dimaksudkan untuk dapat mengembangkan perekonomian di daerah perbatasan RRT. Selain itu, presiden Xi Jinping juga melakukan pendekatan hubungan antara RRT dengan ASEAN melalui Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 untuk mempromosikan kerjasama maritim antara RRT dan ASEAN. Kebijakan OBOR merupakan salah satu pilar Kebijakan Luar Negeri RRT di wilayah Asia Tenggara. Namun, pada kenyataannya kebijakan OBOR mencakup negara Myanmar. Sehingga, jika dikaitkan antara kebijakan OBOR dengan Kebijakan Luar Negeri RRT terhadap Myanmar adalah RRT membuat jalur akses energi yaitu jalur pipa minyak dan gas yang dibangun di Myanmar. Jalur pipa minyak dan gas ini merupakan bagian dari kebijakan OBOR. RRT beranggapan bahwa kebijakan OBOR mampu menjadi peluang potensial bagi RRT untuk mencapai kepentingan dalam mendapatkan sumber daya energi untuk dapat memenuhi kebutuhan energi minyak dan gas melalui pipa minyak dan gas tersebut.

Dalam Kebijakan Luar Negeri RRT di bidang politik, RRT memiliki lima prinsip dalam menjalankan kebijakannya. Prinsip tersebut diantaranya adalah: hidup damai secara berdampingan, menghormati kedaulatan dan integritas territorial, tidak ikut campur dalam permasalahan domestik sebuah negara, menjalin kerjasama dengan negara-negara berkembang, serta menjalin kerjasama

multilateral. Kebijakan Luar Negeri politik RRT terhadap Myanmar terkait isu Rohingya, RRT memilih untuk tidak mengintervensi permasalahan tersebut. RRT hanya mendukung kebijakan tersebut melalui pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri RRT. Selain itu, RRT lebih menghargai tindakan Myanmar dalam menyelesaikan permasalahan negaraya sendiri. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan citra RRT di mata Myanmar dan untuk meningkatkan kerjasama antar kedua negara. Di sisi lain, dukungan yang diberikan RRT terhadap Myanmar adalah untuk menggeser pengaruh AS dalam mencapai kepentingan Luar Negerinya.

Dapat kita ketahui bahwa RRT dan Myanmar cukup banyak menjalin kerjasama terutama bidang ekonomi dan politik. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa Myanmar merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki cadangan energi alam dan gas yang mencukupi. RRT merupakan salah satu negara yang memiliki keterbatasan energi sehingga RRT memanfaatkan sumber daya energi dan gas Myanmar untuk dapat memenuhi kebutuhan RRT dalam jangka waktu yang panjang. RRT memiliki kepentingan-kepentingan tersendiri terhadap Myanmar. Kepentingan tersebut dibagi dalam dua bidang yaitu ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, RRT memiliki kepentingan seperti pertambangan dan pembangkit tenaga listrik. Namun, yang menjadi kepentingan utama RRT di Myanmar khususnya di wilayah Rakhine adalah proyek pipa minyak dan gas yang menghubungkan wilayah kedua negara. Proyek pipa ini dimulai dari pelabuhan Kyauk Phyu hingga ke wilayah Kunming, RRT.

Kemudian, kepentingan utama RRT dalam bidang politik adalah untuk mengambil alih kekuasaan dan mendominasi kekuasaan di negara Myanmar. RRT

juga mencari dukungan Myanmar terhadap posisinya dalam sengketa Laut China Selatan pada forum regional KTT ASEAN yang dilaksanakan pada tahun 2014 di Myanmar. Konflik Rohingya yang terjadi di wilayah Rakhine merupakan sebuah hambatan bagi RRT karena konflik tersebut dapat menghambat proses pembangunan proyek pipa minyak dan gas yang merupakan kepentingan utama RRT di Myanmar.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dengan menggunakan *Rational Choice Theory* yang pertama kali dipopulerkan oleh James S. Coleman pada tahun 1989, dukungan yang diberikan oleh RRT terhadap kebijakan pemerintah Myanmar dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan pada dua variabel yaitu *cost and benefit*. Selain itu, peneliti juga menggunakan hambatan-hambatan dalam menerapkan RCT kedalam analisis. Sehingga, dari hasil analisis ini peneliti menemukan jawaban untuk menjawab rumusan masalah.

- *Cost*

Cost dalam analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana strategi yang digunakan RRT untuk mendapatkan kepentingannya di Myanmar. Dalam strategi yang digunakan RRT adalah RRT mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya karena dianggap paling minim resiko dibandingkan dengan strategi lainnya. Pada strategi ini, peneliti menemukan bahwa resiko yang didapatkan hanyalah berupa kritikan secara tidak langsung oleh AS. Kritikan tersebut dikeluarkan oleh AS lantaran RRT dianggap telah melindungi Myanmar dari sanksi PBB.

- *Benefit*

Adapun *benefit* yang dirasakan oleh RRT dalam bidang ekonomi, RRT telah melakukan MoU dengan Myanmar terkait proyek besar pembangunan pipa minyak dan gas yang dibangun di Myanmar dan telah disepakati oleh kedua negara. Sedangkan keuntungan yang dirasakan dalam bidang politik RRT telah berhasil mendominasi pengaruhnya di Myanmar. Hal ini terbukti ketika kecaman yang dikeluarkan oleh AS terkait isu Rohingya membuat Myanmar berpaling dari AS dan memilih lebih mengeratkan hubungannya dengan RRT. Selain itu, Myanmar juga telah mendukung posisi RRT dalam sengketa Laut China Selatan pada forum regional ASEAN di Myanmar tahun 2014 silam.

- Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh RRT dalam menjalankan kepentingan proyek pipa minyak dan gas.

Adapun hambatan-hambatan yang didapat oleh RRT dalam menjalankan proyek pipa minyak dan gasnya di Myanmar yaitu pembengkakan biaya serta munculnya ancaman dari negara India. Hambatan ini dirasakan oleh RRT karena sangat mempengaruhi jalannya proyek pipa minyak dan gas menjadi terhambat akibat hambatan-hambatan yang muncul.

Dalam skripsi ini, telah membahas dan menganalisis tentang analisis kepentingan RRT dalam mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan mendukung kebijakan pemerintah Myanmar terhadap Rohingya, akan mempermudah RRT untuk mendapatkan kepentingan-kepentingannya di Myanmar. Kepentingan-kepentingan RRT di Myanmar terbagi ke dalam dua bidang

yaitu bidang ekonomi politik. Penulis berharap bahwa akan ada penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas dari bidang yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. (1982). Retrieved from Burma Citizenship Law : <http://eudo-citizenship.eu/admin/?p=file&appl=currentCitizenshipLaws&f=1982%20Myanmar%20Citizenship%20Law%20%5BENGLISH%5D.pdf>
- _____. (1982). Retrieved Maret 22, 2018, from Burma Citizenship Law: <http://un-act.org/publication/view/myanmars-citizenship-law-1982/>
- Ah, O. Y. (2017, September 4). China's Economic Ties with Southeast Asia. *World Economy Brief*, 7(18), 1.
- Aljazeera*. (2017, Agustus 24). Retrieved Maret 22, 2018, from Commission urges Myanmar to end Rohingya restrictions : <https://www.aljazeera.com/news/2017/08/commission-urges-myanmar-rohingya-restrictions-170824083520877.html>
- Amnesty International* . (2004, Mei). Retrieved Maret 31, 2018, from The Rohingya Minority : Fundamental Rights Denied : <https://www.amnesty.org/download/Documents/92000/asa160052004en.pdf>
- Amnesty International* . (2016, Juni 24). Retrieved April 03, 2018, from Myanmar : Investigate violent destruction of mosque buildings : <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/myanmar-investigate-violent-destruction-of-mosque-buildings/>
- Amnesty International*. (2017). Retrieved from "Terpenjara Tanpa Atap" Apartheid di Negara Bagian Rakhine di Myanmar: <https://www.amnesty.org/download/Documents/ASA1674842017INDONESIAN.pdf>
- Amnesty International UK*. (2017). Retrieved Agustus 10, 2018, from Myanmar's apartheid against the Rohingya : <https://www.amnesty.org.uk/myanmar-apartheid-against-rohingya>
- Anshori, I. (n.a). Perilaku memilih lembaga pendidikan: Prespektif teori Rational Choice dan Bounded Rational. 139-140.
- Arjawa, S. (2014). Pilihan Rasional di Balik Pembebasan Corby. 8(1), 51.

- Asia News* . (2017, Juli 9). Retrieved Juli 5, 2018, from Myanmar seeking Russian and Chinese support to block UN resolution on Rakhine:
<http://www.asianews.it/news-en/Myanmar-seeking-Russian-and-Chinese-support-to-block-UN-resolution-on-Rakhine-41717.html>
- Balachandran, P. K. (2017, November 9). *The Citizen* . Retrieved Juli 9, 2018, from UNSC Drops Resolution for Mild Statement on Rohingya, Sovereignty Comes in the Way:
<http://www.thecitizen.in/index.php/en/newsdetail/index/2/12209/unsc-drops-resolution-for-mild-statement-on-rohingya-sovereignty-comes-in-the-way>
- Barnidge, C. H. (2005, September). *Global Commission On International Migration (GCIM)*. Retrieved Maret 28, 2018, from The Right to Leave one's own country under international law:
https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/GCIM_TP8.pdf
- BBC Indonesia* . (2012, Oktober 28). Retrieved April 03, 2018, from Pemerintah Burma akui ada pembakaran di Rakhine :
http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2012/10/121028_rakhineburnout.shtml
- BBC News* . (2018, April 16). Retrieved Mei 15, 2018, from Bangladesh rejects Myanmar claim that Rohingya family was repatriated :
<http://www.bbc.com/news/world-asia-43783451>
- Bodeen, C. (2017, Oktober 21). Retrieved Oktober 7, 2018, from China supports Myanmar ‘safeguarding peace and stability’:
<https://www.apnews.com/d90cc75532c844f4a360b4e4c789f373>
- Budiarjo, P. M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 93-94.
- Buhi, J. (2014). Doreign Policy and The Chinese Constitutions During The Hu Jintao Administration. *Boston College International & Comparative Law Review*, 37(24), 244.
- Buncombe, A. (2012, Desember 05). *Independent UK* . Retrieved Mei 07, 2018, from Homeless and helpless : The Rohingya Muslims of Rakhine State :

- <https://www.independent.co.uk/news/world/asia/homeless-and-helpless-the-rohingya-muslims-of-rakhine-state-8386822.html>
- Carrol, J. (2014, Agustus 04). *Aljazeera* . Retrieved April 04, 2018, from Myanmar's Rohingya deprived of education :
<https://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/08/myanmar-rohingya-deprived-education-201484105134827695.html>
- CGTN . (2017, Oktober 21). Retrieved September 4, 2018, from Why China does not interfere in Myanmar's Rohingya crisis:
https://news.cgtn.com/news/3351544e31597a6333566d54/share_p.html
- Chan, T. N. (2013, Maret 12). *South China Morning Post* . Retrieved Februari 13, 2018, from Beijing first special envoy for Asia to focus on Myanmar:
<http://www.scmp.com/news/china/article/1188814/beijings-first-special-envoy-asia-focus-myanmar>
- Chan-Kim, Y. (2016). *Chinese Global Production Networks in ASEAN*. London, UK: Springer International Publishing Switzerland.
- Clapp, P. A. (2015). *China's relation with Burma*. US Institute of Peace and the Asia Society, 4-5.
- Clark, J. (1996). *James S. Coleman*. London: Falmer Press, 293-294.
- Coghill, K. (2017, Oktober 21). *Reuters*. Retrieved September 4, 2018, from China official says of Rohingya crisis foreign interference doesn't work:
<https://www.reuters.com/article/uk-china-congress-myanmar/china-official-says-of-rohingya-crisis-foreign-interference-doesnt-work-idUKKBN1CQ04X>
- Copper, J. F. (2016). *China's Foreign Aid and Investment Diplomacy : History and Practice in Asia, 1950-Present*. London, UK: Palgrave Macmillan, 141.
- Corr, A. (2016, Desember 31). *Forbes*. Retrieved September 3, 2018, from Exclusive: Asian Diplomat On Chinese Role In Myanmar's Rohingya Tragedy: <https://www.forbes.com/sites/anderscorr/2016/12/31/exclusive-asian-diplomat-on-chinese-role-in-myanmars-rohingya-tragedy/#3b44f2556155>

- Corridor of Power : China's Trans-Burma Oil and Gas Pipelines* . (2009). Chiang Mai: Shwe Gas Movement .
- Dawn*. (2017, Oktober 22). Retrieved September 4, 2018, from Rohingya crisis: China says foreign interference doesn't work:
<https://www.dawn.com/news/1365464>
- Deliarnov. (2006). *Mencakup Berbagai Teori dan Konsep yang Komprehensif Ekonomi Politik* . Jakarta: Erlangga, 134.
- Deutsche Welle* . (2018). Retrieved Agustus 10, 2018, from Rohingya crisis: UN Security Council condemns excessive violence in Myanmar:
<https://www.dw.com/en/rohingya-crisis-un-security-council-condemns-excessive-violence-in-myanmar/a-40495836>
- Djelantik, S. (2015). *Asia Pasifik Konflik, Kerjasama, dan Relasi Antarkawasan* . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 261-262.
- Dompere, K. K. (2004). *Cost-Benefit Analysis and the Theory of Fuzzy Decisions: Identification and Measurement Theory*. New York: Springer, 132.
- Dunn, C. (2016). *Chinese Investment in Myanmar*. Beijing, China: Global Environmental Institute, 5-7.
- Dunn, C. (2016). *Chinese Investment in Myanmar*. Beijing, China: Global Environment Institute, 7.
- Fadhli, Y. Z. (2014, Juni). Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia. *11*(02), 362.
- Gillan, M. (2009). *Trade, Labour and Transformation of Community in Asia* . London, United Kingdom: Palgrave Macmillan, 36-37.
- Green, P. (2015). *Countdown to Annihilation : Genocide in Myanmar* . United Kingdom: International State Crime Initiative, 21-23.
- Human Right Watch* . (2013, Mei 28). Retrieved April 02, 2018, from Burma : Revoke 'Two-Child Policy' for Rohingya :
<https://www.hrw.org/news/2013/05/28/burma-revoke-two-child-policy-rohingya>
- Human Rights Watch* . (2012, November 17). Retrieved Mei 05, 2018, from Burma : Satellite Images Show Widespread Attacks on Rohingya :

- <https://www.hrw.org/news/2012/11/17/burma-satellite-images-show-widespread-attacks-rohingya>
- Human Rights Watch* . (2016, Oktober 21). Retrieved April 04, 2018, from Burma : Aid Blocked to Rakhine State :
<https://www.hrw.org/news/2016/10/21/burma-aid-blocked-rakhine-state>
- Human Rights Watch* . (2018, Februari 23). Retrieved Agustus 28, 2018, from Burma: Scores of Rohingya Villages Bulldozed New Satellite Images Show Destruction Indicating Obstruction of Justice:
<https://www.hrw.org/news/2018/02/23/burma-scores-rohingya-villages-bulldozed>
- Human Rights Watch*. (2013, April 22). Retrieved Mei 05, 2018, from Burma : end 'Ethnic Cleansing' of Rohingya Muslims :
<https://www.hrw.org/news/2013/04/22/burma-end-ethnic-cleansing-rohingya-muslims>
- IHLO*. (2014, Januari). Retrieved Juni 01, 2018, from Briefer on Chinese Investment in Myanmar: <http://www.ihlo.org/CINTW/Burma.pdf>
- International Crisis Group*. (2010, September 21). Retrieved September 9, 2018, from China's Myanmar Strategy: Elections, Ethnic Politics and Economics: <https://www.crisisgroup.org/asia/south-east-asia/myanmar/china-s-myanmar-strategy-elections-ethnic-politics-and-economics>
- Isnarti, R. (2017). The Potential Threat of China-Myanmar Gas Pipeline. *AEGIS*, 1(2), 200.
- Isnarti, R. (2017). The Potential Threat of China-Myanmar Gas Pipeline. *AEGIS*, 1(2), 202-204.
- Istijanto. (n. a). *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 38.
- JPNN*. (2017, September 03). Retrieved Maret 21, 2018, from Pengungsi Rohingya di Indonesia : Kami Salah Apa ?:
<https://www.jpnn.com/news/pengungsi-rohingya-di-indonesia-kami-salah-apa>

- Karaman, B. (2014, Oktober 20). *Thailand Ranks Second Largest Investor in Myanmar after China*. Retrieved from Thailand Business News :
<https://www.thailand-business-news.com/asean/49238-investment-boom-myanmar-thailand-second-largest-china.html>
- Kartini, I. (2015). Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan Implikasinya Bagi Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(2), 134.
- Kartini, I. (2015). Kebijakan Jalur Sutra Baru Cina dan Implikasinya Bagi Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Wilayah*, 6(2), 135-136.
- Kate, D. T. (2011, Desember 04). *Bloomberg*. Retrieved Februari 08, 2018, from Myanmar Seeks 'Win-Win-Win' in Balancing U.S-China Competition:
<https://www.bloomberg.com/news/print/2011-12-04/myanmar-seeks-win-win-win-in-balancing-u-s-china-competition.html>
- Latt, W. K. (2013, Januari 17). *Mizzima*. Retrieved September 4, 2018, from Myanmar-China ties to help on South China Sea issue, says presidential spokesman: <http://archive-3.mizzima.com/mizzima-news/myanmar/item/10826-myanmar-china-ties-to-help-on-south-china-sea-issue-says-presidential-spokesman/10826-myanmar-china-ties-to-help-on-south-china-sea-issue-says-presidential-spokesman>
- Liangyu. (2017, Oktober 18). *Xinhua*. Retrieved Oktober 5, 2018, from Xi says China will only become more and more open:
http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/18/c_136688776.htm
- Lintar, B. (2018, Juni 5). *Asia Times* . Retrieved September 4, 2018, from Myanmar risks falling into a China debt trap:
<http://www.atimes.com/article/myanmar-risks-falling-into-a-china-debt-trap/>
- Lowenstein, A. K. (2015, Oktober). *International Human Rights Clinic* . Retrieved April 22, 2018, from Persecution of the Rohingya Muslims : Is genocide occurring in Myanmar's Rakhine State ? :
http://www.fortifyrights.org/downloads/Yale_Persecution_of_the_Rohingya_October_2015.pdf
- Medecins Sans Frontieres (MSF)*. (2013, Mei 27). Retrieved April 04, 2018, from Myanmar : Restrictions Severely Impacting Access to Health Care :

- <https://www.doctorswithoutborders.org/news-stories/press-release/myanmar-restrictions-severely-impacting-access-health-care>
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China*. (N. a). Retrieved from China's Initiation of the five principle of peaceful co-existence: http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18053.shtml
- Mitchell, T. (2012). *Chinese Foreign Direct Investment in Myanmar : Remarkable Trends and Multilayered Motivations* . Swedia: Spring, 48-49.
- Mitzy, G. I. (2014, Desember). Perlawanan Etnis Muslim Rohingya Terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar. *Indonesian Journal of International Studies (IJIS)*, 1 No. 2, 154-155.
- Mukadimah. (1948, Desember 10). *KOMNASHAM*. Retrieved Maret 28, 2018, from Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia : [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)
- Mustafic, A. (2016). China's One Belt, One Road and Energy Security Initiatives: A Plan to Conquer the World? *Sarajevo Journal of Social Sciences Inquiry* , 2(2), 156-157.
- Nagai, O. (2018, Agustus 4). Retrieved September 4, 2018, from China lobbies ASEAN for joint military drills without US: <https://asia.nikkei.com/Politics/International-Relations/China-lobbies-ASEAN-for-joint-military-drills-without-US>
- Nichols, M. (2018, Mei 15). *Reuters* . Retrieved September 9, 2018, from U.S. criticises China for shielding Myanmar from U.N. action: <https://uk.reuters.com/article/uk-myanmar-rohingya-un/u-s-criticises-china-for-shielding-myanmar-from-u-n-action-idUKKCN1IG00J>
- Nicosia, S. (2017, Oktober 02). *VOA* . Retrieved April 04, 2018, from Exoduse Worsens Education for Rohingya Childern: <https://www.voanews.com/a/rohingya-children-education-/4052917.html>
- Ogu, M. (2013). Rational Choice Theory: Assumptions, Strengths, and Greatest Weaknesses in Aplication Outside The Western Milieu Context. *Arabian Journal of Business and Management Review*, 1(3), 93.

- Ogu, M. (2013). Rational Choice Theory: Assumptions, Strengths, and Greatest Weaknesses in Application Outside The Western Milieu Context. *Arabian Journal of Business and Management Review*, 1(3), 94.
- Panwar, N. (2009). India and China competing over Myanmar Energy resources. *Working draft for BISA Conference*, (pp. 1-2). Inggris.
- Peng, N. (2018, Agustus 24). *East Asia Forum*. Retrieved Oktober 7, 2018, from China and Myanmar's budding relationship:
<http://www.eastasiaforum.org/2018/08/24/china-and-myanmars-budding-relationship/>
- Pennington, M. (2017, Mei 27). Retrieved September 4, 2018, from Myanmar, having warmed to the West, turns to China again:
<https://www.apnews.com/934850a3df5d4d63add4b8fa5b2db633>
- Perlez, J. (2014, November 06). *The New York Times* . Retrieved Februari 14, 2018, from Myanmar Policy's Message to Muslims : Get Out :
<https://www.nytimes.com/2014/11/07/world/asia/rohingya-myanmar-rakhine-state-thailand-malaysia.html>
- Policy, I. F. (2016). The Belt & Road Initiative . p. 3. Retrieved from ISDP:
<http://isdpr.eu/content/uploads/2016/10/2016-The-Belt-and-Road-Initiative.pdf>
- Ramadhan, I. (2018). China's Belt Road Initiative: Dalam Pandangan Teori Geopolitik Klasik. *Intermestic: Journal of International Studies* , 2(2), 140-141.
- Ramzy, A. (2017, September 18). *New York Times* . Retrieved Februari 14, 2018, from Myanmar Draws Scorn for Rohingya Crisis, but few urge sanctions :
<https://www.nytimes.com/2017/09/18/world/asia/myanmar-rohingya-sanctions.html>
- Ritzer, G. (2008). *Teori Sosiologi Modern* . Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 449.
- Rosidin. (2015). Analisis Teori Pilihan Rasional Terhadap Transformasi Madrasah. 7(2), 270-271.

- Security Council Report*. (2018, Juni 05). Retrieved Juli 05, 2018, from The Veto: <https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php>
- Shaw, M. (2015). *What is Genocide ?* UK: Polity Press, 1.
- Sherpa, T. C. (2016). Importance of Myanmar in China's Strategic Interest: A Case Study on Sino-Myanmar Oil and Gas Pipelines. India: Department of International Relations School of Social Sciences Sikkim University, 67.
- Shihong, B. (2015, Mei 20). *Global Times* . Retrieved Agustus 4, 2018, from Myanmar keeps ASEAN position neutral on South China Sea disputes: <http://www.globaltimes.cn/content/861288.shtml>
- Shin, A. (2017, Juli 27). *Myanmar Times* . Retrieved Juni 5, 2018, from Myanmar to receive revenues from China-Myanmar crude oil pipeline: <https://www.mmtimes.com/business/26982-myanmar-to-receive-revenues-from-china-myanmar-crude-oil-pipeline.html>
- Sorensen, C. T. (2015). The Significance of Xi Jinping's "Chinese Dream" for Chinese Foreign Policy: From "Tao Guang Yang Hui" to "Fen Fa You Wei". 3(1), 59.
- South China Morning Post*. (2017, September 15). Retrieved September 3, 2018, from US demands a stop to Myanmar's 'unacceptable' violence against Rohingya Muslims: <https://www.scmp.com/news/world/united-states-canada/article/2111265/us-denounces-violence-against-rohingya-muslims>
- South, A. (2004, Agustus). Political Transition in Myanmar : A New Model for Democratization . 26(2), 235-237.
- Srinivas, A. (2014). Sino-Myanmar Oil and Gas Pipelines and their Implications for India . *Global Journal of Finance and Management* , 6(9), 593.
- Suastha, R. D. (2017, November 21). *CNN Indonesia* . Retrieved April 03, 2018, from Aktivis Tuduh Rezim Apartheid Myanmar Picu Krisis Rohingya : <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171121185615-106-257185/aktivis-tuduh-rezim-apartheid-myanmar-picu-krisis-rohingya>
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Thesis* . Yogyakarta: Suaka Media .

- Sun, Y. (2012). China's Strategic Misjudgement on Myanmar, in: Journal of Current Southeast Asian Affairs. *Research Gate*, 31(1), 82.
- Sun, Y. (2013). *Chinese Investment in Myanmar : what lies ahead ?* STIMSON.
- Swaine, M. D. (n.a). Xi Jinping on Chinese Foreign Relations: The Governance of China and Chinese Commentary . 48, 4-7.
- Tech, Z. (2017, September 27). *MITV*. Retrieved November 28, 2017, from 68th Anniversary : National Day of The People's Republic of China Hosts In Nay Pyi Taw: <http://www.myanmarinternationaltv.com/news/68th-anniversary-national-day-people's-republic-china-hosts-nay-pyi-taw>
- Than, T. M. (2013). Myanmar and China : A Special Relationship ? *Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS)*, 196-198.
- The Global New Light of Myanmar* . (2017, September 14). Retrieved Juli 2 13, 2018, from Rakhine issue is an internal affair: Chinese Ambassador: <http://www.globalnewlightofmyanmar.com/rakhine-issue-internal-affair-chinese-ambassador/>
- The Guardian* . (2013, Mei 25). Retrieved April 03, 2018, from Burmese Muslims given two-child limit : <https://www.theguardian.com/world/2013/may/25/burma-muslims-two-child-limit>
- The Guardian* . (2017, Oktober 04). Retrieved April 05, 2018, from Rohingya crisis : aid groups seek \$434m to help refugees in Bangladesh : <https://www.theguardian.com/world/2017/oct/04/rohingya-crisis-aid-groups-seek-400m-to-help-a-million-people-in-bangladesh>
- The Guardian*. (2012, Maret 22). Retrieved from China Invests in south-east Asia for trade, food, energy and resources: <https://www.theguardian.com/world/2012/mar/22/china-south-east-asia-influence>
- The Irrawaddy*. (2017, September 1). Retrieved Juli 9, 2018, from Analysis: China Backs Myanmar at UN Security Council: <https://www.irrawaddy.com/news/burma/analysis-china-backs-myanmar-un-security-council.html>

- The Registration of Foreigners ACT*. (1940, Maret 28). Retrieved Maret 28, 2018, from
http://www.burmalibrary.org/docs09/Registration_of_Foreigners_Act-1940.pdf
- The Straitstimes*. (2017, September 12). Retrieved Juli 13, 2018, from China backs Myanmar government efforts to 'safeguard stability':
<https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/china-backs-myanmar-government-efforts-to-safeguard-stability>
- Thontowi, J. (2013, Januari 01). Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional. *Pandecta* , 08. No. 1, 46.
- UN Committee on the Rights of the Child (CRC)*. (2006, September 20). Retrieved Maret 22, 2018, from General Comment No. 7 (2005): Implementing Child Rights in Early Childhood:
<http://www.refworld.org/docid/460bc5a62.html>
- UNHCR*. (2018, Maret 20). Retrieved Maret 21, 2018, from Immigration and Refugee Board of Canada :
<http://www.refworld.org/docid/3ae6ad458.html>
- United Nations Foundation* . (2013). Retrieved from What We Do: The UN Security Council: <http://www.unfoundation.org/what-we-do/issues/united-nations/the-un-security-council.html>
- United Nations Human Rights* . (1966, Desember 16). Retrieved Maret 28, 2018, from International Covenant on Civil and Political Rights :
<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>
- United Nations Human Rights Council* . (2018, Maret 12). Retrieved Juli 2 5, 2018, from Independent international fact-finding mission on Myanmar:
<https://www.ohchr.org/EN/hrbodies/hrc/myanmarffm/pages/index.aspx>
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner* . (2017, Maret 24). Retrieved Juli 5, 2018, from Human Rights Council decides to dispatch a fact-finding mission to Myanmar to establish facts on violations, especially in Rakhine State:

<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21443&LangID=E>

United Nations Security Council . (2007, Januari 12). Retrieved Juli 25, 2018, from United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America: draft resolution:

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2007/14

United Nations Universal Declaration of Human Rights. (1948). Retrieved from <http://www.jus.uio.no/lm/un.universal.declaration.of.human.rights.1948/portrait.a4.pdf>

Universal Declaration of Human Rights . (n. a). Retrieved from

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf

Universe Logistics Group . (2016, Maret 31). Retrieved Juli 13, 2018, from Thailand Ranks Second Largest investor in Myanmar:

<http://universelogisticsgroup.com/thailand-ranks-second-largest-investor-in-myanmar/>

Universe Logistics Group. (2016, Maret 31). Retrieved Juli 2 13, 2018, from Thailand RTHAILAND RANKS SECOND LARGEST INVESTOR IN MYANMAR: <http://universelogisticsgroup.com/thailand-ranks-second-largest-investor-in-myanmar/>

Waluyo, T. J. (2013, Februari). Konflik Tak Seimbang Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Myanmar . *4*(2).

Wekke, S. &. (2016). *Governance in Southeast Asia: Indonesia - Malaysia Perspective on Politics and Social Studies*. Yogyakarta: Deepublish, 75.

Yamei. (2017, November 20). *Xinhua*. Retrieved Oktober 7, 2018, from China proposes three-phase solution to Rakhine issue in Myanmar: FM: http://www.xinhuanet.com/english/2017-11/20/c_136764392.htm

Yin, J. L. (2017, Maret 21). Retrieved Oktober 5, 2018, from China's economic growth could help other developing countries: <https://phys.org/news/2017-03-china-economic-growth-countries.html>

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PT Fajar Interpramata Mandiri, 328.

Zhao, H. (2011). China–Myanmar Energy Cooperation and Its Regional Implications, in: Journal of Current Southeast Asian Affairs. *Journal of Current Southeast Asian Affairs* , 30(4), 92.